

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tren perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi saat ini membawa perubahan besar kepada masyarakat atau publik dari tradisional menjadi modern. Eksistensi media cetak di Indonesia pun mulai melambat. Faktor utama yang menyebabkan menurunnya tiras media cetak adalah kehadiran internet. Pola kehidupan masyarakat berubah sedikit demi sedikit karena kehadiran internet. Pola kehidupan masyarakat yang berubah disebabkan oleh pergeseran era revolusi industri yang mengubah pola relasi dan komunikasi masyarakat. Revolusi industri 2.0 ditandai dengan kemunculan pesawat telepon. Revolusi industri 3.0 menjadikan pola komunikasi yang kekinian (*real time*). Dan saat ini revolusi 4.0 dimana munculnya era digitalisasi, yang mengubah gaya hidup masyarakat menjadi mudah karena segala hal dapat diakses melalui internet di era digitalisasi seperti saat ini.

Kehadiran berbagai alat komunikasi dan alat elektronik canggih lainnya semakin memudahkan masyarakat dalam menemukan segala informasi secara cepat dan dimana saja asalkan terhubung dengan internet. Banyaknya konten dan *fitur* membuat masyarakat beralih dalam mengakses informasi melalui media baru. Internet memberi pengaruh yang sangat besar pada pola pikir dan perilaku masyarakat. Masyarakat semakin butuh informasi yang mudah diakses dan disajikan secara cepat (*real time*). Disinilah media cetak tidak lagi mampu memenuhi tuntutan ini dimana kecepatan informasi yang diutamakan bagi masyarakat saat ini.

Keengganan masyarakat pada media cetak semakin dipicu ketika media yang tirasnya semakin menurun dan menaikkan harga. Selain itu, keterlambatan penyajian informasi, kualitas cetakan, penulisan dan pemberitaan pun relatif belum membaik. Karena mayoritas pengakses informasi adalah generasi muda, maka media perlu menyesuaikan diri

dengan selera masyarakat, karena akses pada media *online* lebih disukai generasi muda saat ini.

Era digitalisasi sudah semakin berkembang maka secara tidak langsung juga mempengaruhi segala hal, termasuk cara kerja *Public Realitions* (PR) atau humas dalam perkembangan instansi. Melalui teknologi internet, tanpa harus bertemu dan dengan jarak yang jauh pun PR dapat melakukan komunikasi dengan publiknya. Saat ini, banyak instansi yang sudah menggunakan teknologi internet seperti membuat *e-mail*, website, bahkan yang terbaru saat ini adalah metode internet sebagai fungsi untuk mempermudah kegiatan PR melalui dunia maya atau sering disebut PR Digital yakni metode kerja PR berbasis teknologi kontemporer atau elektronik PR.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi serta tuntutan era digitalisasi, maka pemanfaatan teknologi sangat banyak diterapkan disegala bidang kehidupan, salah satunya bidang pemerintahan. Humas di lembaga pemerintahan memiliki tanggung jawab sebagai penghubung antar lembaga pemerintah, lembaga pemerintah dengan lembaga-lembaga non pemerintah, lembaga pemerintah dengan media dan antara lembaga pemerintah dengan aparaturnya serta kepada publik. Ditengah beragamnya media komunikasi yang ada saat ini, humas pemerintah dituntut untuk dapat memilih media yang tepat dan baik untuk publik internal maupun eksternal. Untuk mendukung dalam meningkatkan kualitas layanan publik, pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai pemanfaatan website untuk mengembangkan *E-Goverment* sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2003. Website yang telah dibangun dengan tujuan memberikan layanan standar kepada publik juga dapat menyampaikan berbagai hal menjadi kebutuhan masyarakat yang kian meningkat. Disinilah perlunya peran praktisi humas (*pracitioner of Public Realitions*) yang sangat diperlukan keberadaannya.

Dalam rangka manifestasi transformasi model pemerintahan menuju konsep model pemerintahan yang lebih berorientasi kepada masyarakat (*citizen centric*) pada tanggal 11 Oktober 2011 pemerintah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meluncurkan website portal jogjaprov.go.id. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan peran humas melalui *online* PR berbasis website. Fungsi dari *online* PR ini adalah tercapainya *E-Government*. Rumusan World Bank tentang *E-Government* mengacu pada penggunaan teknologi informasi (seperti *Wide Area Network*, internet, dan *mobile computing*) oleh instansi pemerintah yang memiliki kemampuan untuk mengubah hubungan dengan masyarakat, bisnis dan badan lain dari pemerintah (Puji Lestari dkk, 2015).

Dengan demikian, humas pemerintah dituntut untuk lebih memanfaatkan kecanggihan teknologi, tidak hanya mengandalkan kegiatan PR secara Konvensional (cetak) namun beralih ke PR Kontemporer (*online*). PR harus memiliki kemampuan menulis press release, membangun relasi, bernegosiasi, serta membaca isu dan momentum harus sejalan dengan kebutuhan saat ini. Salah satu tugas atau pekerjaan *Public Realitions* adalah menghasilkan produk-produk tulisan yang sifatnya menyebarkan informasi kepada publik. Menyusun rilis berita dalam bentuk cetak atau siaran, cerita *feature*, *newsletter* untuk karyawan dan *stakeholder* eksternal, korespondensi, pesan *website* dan pesan media *online* lainnya, laporan tahunan dan shareholder, pidato, brosur, film dan materi-materi pendukung teknis lainnya. Oleh karena itu, PR dituntut untuk menguasai teknik-teknik menulis (*Public Realitions Writing*).

Salah satu tugas humas Pemda DIY adalah meliput kegiatan dan membuat berita terkait dengan kegiatan Gubernur DIY, Wakil Gubernur DIY, Sekertaris DIY, dan pejabat Pemda DIY lainnya. Oleh sebab itu, humas Pemda DIY dituntut untuk menguasai kemampuan menulis press release, yang nantinya rilis tersebut akan diunggah di website jogjaprov.go.id. Hal ini dilakukan agar masyarakat mengetahui informasi terkait kegiatan dan program-program yang ada di Pemda DIY melalui website. Untuk menambah jumlah pengunjung website, humas Pemda

DIY juga menggunakan media sosial seperti instagram sebagai sarana agar masyarakat tertarik membaca berita yang ada di website Pemda DIY.

Oleh karena itu, penulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran humas Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam *Press Release* untuk website [jogjaprov.go.id](http://jogjaprov.go.id).

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang sudah dipaparkan di atas, rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan laporan tugas akhir ini adalah bagaimana “Peran humas Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam kegiatan Press Release untuk website [jogjaprov.go.id](http://jogjaprov.go.id)”.

## C. Tujuan PKL

Praktek Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan dengan beberapa tujuan, adapun tujuan PKL adalah sebagai berikut :

1. Memperoleh gambaran nyata tentang kegiatan Public Realitions di Biro Umum Humas dan Protokol Pemerintah Daerah DIY.
2. Mampu mempelajari proses publikasi kegiatan yang ada di humas Pemda DIY.
3. Mengetahui pentingnya proses publikasi kegiatan humas Pemda DIY melalui media elektronik internet.

## D. Manfaat PKL

Adapun manfaat PKL di humas Pemda DIY bagi penulis adalah sebagai berikut :

### 1. Bagi Mahasiswa

Manfaat kegiatan PKL bagi mahasiswa adalah unntuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa tentang kerja nyata di Biro Umum Humas dan Protokol Pemerintah Daerah DIY, menjalin banyak relasi dan mampu mengembangkan ilmu yang didapat dibangku perkuliahan dan mempraktikkan ilmu komunikasi.

## 2. Bagi Instansi

Manfaat kegiatan PKL bagi Humas Pemda DIY adalah menjadi perantara antara humas Pemda DIY dengan lembaga pendidikan juga mendapatkan tambahan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melaksanakan kegiatan atau tugas harian maupun di lapangan khususnya sesuai dengan fungsi *Public Realitions*.

## E. Waktu dan Tempat PKL

Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan pada :

### 1. Tempat

Biro Umum Humas dan Protokol Sekertariat Pemerintah Daerah  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Alamat : Jalan Malioboro No 52-54 Yogyakarta

Telepon : (0274) 562811

E-mail : birouhp@jogjaproov.go.id

### 2. Waktu

Tanggal : 11 Februari – 1 Mei 2019

Hari : Senin – Jumat

Waktu : Pukul 07.30 – 15.30 WIB

Hari Jumat pukul 07.30 – 14.30 WIB

## F. Metode Penelitian

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis selama PKL di humas Pemerintah Daerah DIY adalah sebagai berikut :

### 1. Observasi

Metode observasi dilakukan melalui pengamatan, pencatatan, dan ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan pada saat di Biro Umum Humas dan Protokol Pemerintah Daerah DIY pada pengelolaan berita di website porta jogjaproov.go.id.

### 2. Wawancara

Metode wawancara dilakukan untuk melengkapi data dalam penulisan laporan tugas akhir. Wawancara dilakukan secara langsung terhadap

pengelolaan berita pada website portal jogjaprovo.go.id, selain itu juga terkait dengan peran humas bagi Pemda DIY. Adapun wawancara dilakukan dengan beberapa karyawan yang ada di Biro Umum Humas dan Protokol Pemerintah Daerah DIY yaitu :

- a. Nama : Ade Aulia Ramadhan  
Jabatan : Staff humas bagian Fotografer
- b. Nama : Tipoek  
Jabatan : Staff humas bagian Reporter
- c. Nama : Dewi Puspitasari  
Jabatan : Staff humas bagian Videografer

- 3. Daftar Pustaka
- 4. Dokumen

## BAB II KERANGKA KONSEP

### A. Penegasan Judul

Dalam penegasan judul ini, penulis akan menjelaskan hal-hal yang melatarbelakangi dan mendukung dalam penulisan laporan tugas akhir penulis. Judul laporan tugas akhir yang diangkat yakni “Peran Humas Pemda DIY dalam penulisan *Press Release* untuk website [jogjaprov.go.id](http://jogjaprov.go.id)”. Dalam hal ini humas melaksanakan perannya yang berkaitan dengan publikasi melalui website.

Salah satu peran humas adalah menulis *Press Release* untuk memberikan informasi kepada publik dalam hal ini bagian yang diambil adalah lembaga pemerintahan Biro Umum Humas dan Protokol Pemerintah Daerah DIY dalam menyebarkan informasi ke publik melalui website [jogjaprov.go.id](http://jogjaprov.go.id).

Pergeseran era revolusi membuat pola komunikasi masyarakat saat ini berubah yang sebelumnya mendapatkan informasi melalui media cetak, namun saat ini masyarakat dapat mengakses informasi melalui internet. Pergeseran era digitalisasi juga berdampak pada pemerintahan, hal ini lah yang membuat humas pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta harus mampu mengikuti perkembangan zaman, dimana humas tidak hanya mampu bekerja secara konvensional namun juga dituntut bekerja secara konvensional.

Adanya kebijakan pemerintah mengenai *E-Government* yaitu untuk menjembatani informasi yang ada di pemerintahan kepada masyarakat guna memperbaiki pelayanan publik. Salah satu bentuk kebijakan yang diaplikasikan di Biro Umum Humas dan Protokol Sekretariat Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu dengan adanya *website* Pemda DIY sebagai upaya penyampaian informasi atau pun kegiatan yang dilakukan oleh aparatur pemda DIY kepada publik. Oleh sebab itu humas Pemda DIY dituntut untuk mampu membuat *press release*/ berita dalam setiap kegiatan yang dilakukan Pemda DIY

## B. Konsep yang Digunakan

### 1. Public Relations

#### a. Definisi Public Relations

Public Relations adalah fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut. PR sebagai sebuah fungsi manajemen yang berarti bahwa manajemen disemua organisasi harus memperhatikan PR serta pembentukan dan pemeliharaan hubungan baik yang saling menguntungkan antara organisasi dengan publik sebagai basis moral dan etis dari profesi PR. ( Cutlip, Center, Broom 2006:6).

Frank Jefkins (1992), menyatakan bahwa PR adalah “Sesuatu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana, baik ke dalam maupun ke luar, antara suatu organisasi dengan khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang spesifik berlandaskan pada saling pengertian”. Menurutnya, PR pada intinya senantiasa berkenaan dengan kegiatan penciptaan pemahaman melalui informasi dan membagi pengetahuan. Melalui kegiatan tersebut diharapkan akan muncul suatu dampak perubahan yang positif.

Berdasarkan ringkasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa PR merupakan fungsi manajemen, yang menciptakan dan memelihara komunikasi, pengertian, dukungan dan kerja sama antara suatu perusahaan atau instansi dengan publiknya sehingga tercipta situasi saling memperoleh manfaat. ( Rudy Harjanto, 2009:96).

#### b. Tugas Public Relations

Tugas dari Public Relations adalah sebagai perantara informasi dari sebuah instansi dengan reaksi dan tanggapan publik sehingga mencapai suasana yang akrab, saling mengerti, dan timbul suasana yang menyenangkan dalam berinteraksi antara instansi



dengan publiknya. Penyesuaian yang menciptakan hubungan yang memberi dan menerima hal-hal yang bisa menggantungkan kedua belah pihak.

Berdasarkan berbagai kegiatan yang penulis lakukan selama menjalankan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di bidang Humas Biro Umum, Humas dan Protokol Pemerintah Daerah Yogyakarta, adapun tugas Humas tersebut sesuai dengan (Rumanti, 2002:39). Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Humas adalah :

- 1) Menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas penyampaian informasi secara lisan, tertulis, melalui gambar (visual) kepada publik
- 2) Mempunyai pengertian yang benar tentang organisasi atau perusahaan, tujuan serta kegiatan yang dilakukan
- 3) Memonitor, merekam dan mengevaluasi tanggapan serta pendapat umum masyarakat. Disamping itu, menjalankan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat
- 4) Memperbaiki citra organisasi. Bagi Public Relations, menyadari citra yang baik tidak hanya terletak pada bentuk gedung, presentasi, publikasi dan seterusnya. Tetapi terletak pada (1) bagaimana organisasi bisa mencerminkan organisasi yang dipercayai, memiliki kekuatan, mengadakan perkembangan secara berkesinambungan yang selalu terbuka untuk dikontrol dan dievaluasi; (2) dapat dikatakan bahwa citra tersebut merupakan gambaran komponen yang kompleks.
- 5) Tanggung jawab sosial. Public Relations merupakan instrumen untuk bertanggung jawab terhadap semua kelompok yang berhak terhadap tanggung jawab tersebut. Suatu organisasi mempunyai kewajiban dalam pelayanan sosial yang harus menjadi tanggung jawab.

Komunikasi. Public Relations mempunyai bentuk komunikasi yang khusus, komunikasi timbal balik, maka pengetahuan komunikasi menjadi modalnya.

c. Peran Public Relations

Peran seorang Public Relations sangat dibutuhkan dalam sebuah instansi atau perusahaan. *Public Relations* merupakan jembatan antara sebuah instansi dengan publik atau antara manajemen dengan karyawan agar tercapai *Mutual Understanding* (saling pengertian) antara kedua belah pihak.

Hal tersebut relevan dengan teori dari buku Cutlip, Center, and Broom (2006:46-48) tentang peran dari praktisi *Public Relations*, yaitu :

1) Teknisi Komunikasi

Kebanyakan praktisi masuk ke bidang ini sebagai teknisi biasanya menyebutkan keahlian komunikasi dan jurnalistik sebagai syarat. Teknisi komunikasi disewa untuk menulis dan mengedit *feature*, mengembangkan isi Web dan menangani kontak media.

2) Expert Prescriber

Dalam hal ini praktisi PR bertugas untuk mewakili perusahaan untuk mendefinisikan problem, mengembangkan program dan bertanggung jawab penuh atas implementasinya. Pada peranan ini seorang PR tanggap terhadap sesuatu yang sedang terjadi di perusahaan dan dapat berperan sebagai seorang penasihat ahli.

3) Fasilitator Komunikasi

Dalam hal ini praktisi PR bertindak sebagai pendengar yang peka dan perantara komunikasi. PR menjaga komunikasi dua arah dan memfasilitasi percakapan dengan menjaga agar saluran komunikasi tetap terbuka. Tujuannya adalah memberi informasi yang dibutuhkan oleh manajemen maupun publik untuk membuat keputusan demi kepentingan bersama.

#### 4) Fasilitator dalam proses pemecah masalah

Seorang PR bekerja sama dengan manajer lain untuk mendefinisikan dan memecah suatu masalah. Hal ini dimaksudkan untuk membantu pimpinan organisasi baik sebagai penasihat hingga mengambil tindakan eksekusi (keputusan) dalam mengatasi persoalan atau krisis yang tengah dihadapi secara rasional dan profesional.

## 2. Humas Pemerintahan

### a. Definisi Humas Pemerintahan

Peran Humas di instansi-instansi pemerintahan saat ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan reformasi termasuk dalam reformasi di bidang birokrasi, pemerintah wajib transparansi kepada masyarakat dalam setiap kegiatan yang dilakukannya. Masyarakat berhak mengetahui segala informasi dari pembuat dan pelaku kebijakan.

Menurut Rosady Ruslan (2004:99) perbedaan utama antara fungsi dan tugas hubungan masyarakat yang terdapat di instansi dinas pemerintah dan lembaga non pemerintah (perusahaan komersil swasta) yaitu tidak ada sesuatu yang diperjualbelikan atau transaksi yang terjadi baik berbentuk produk atau jasa pelayanan yang ditawarkan kepada pihak yang membutuhkan secara komersil. Walaupun ada pihak humas pemerintah melakukan hal yang sama dengan perusahaan komersial, seperti melaksanakan kegiatan kampanye publikasi, promosi pemasaran, dan periklanan, namun hal tersebut lebih lebih menekankan pada bentuk *public service* atau *public utilites* demi kepentingan pelayanan umum (masyarakat).

Hal tersebut sesuai dengan definisi humas pemerintahan menurut Rachmadi (1999:77) yaitu Humas Pemerintah adalah “merupakan suatu keharusan fungsional dalam rangka tugas penyebaran informasi kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan lembaga pemerintah kepada masyarakat”.

Astrid S. Susanto menyampaikan bahwa humas pemerintah atau *government public relations*, menurut tindakan yang ditujukan menghasilkan pendapat dan iklim pendapat yang mendukung suatu instansi.

Berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 371/M.KOMINFO/8/2007 tentang Kode Etik Hubungan Masyarakat Pemerintah, yang dimaksud humas pemerintah adalah aktivitas lembaga dan atau individu yang melaksanakan fungsi manajemen dalam bidang komunikasi dan informasi kepada publik pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan sebaliknya.

Pada posisi pemerintah Humas harus memahami apa yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh pemerintah termasuk di dalamnya kebijakan program tingkat capaian serta persoalan yang dihadapi. Sedangkan diposisi masyarakat Humas harus mampu memahami karakteristik dan dinamika masyarakat. Sehingga Humas diharapkan mampu menangkap dan memahami aspirasi, keinginan, dan tujuan masyarakat. Mengkomunikasikan informasi tentang kinerja pemerintah kepada masyarakat sangat penting dan strategis. Penyampaian informasi tersebut selain agar masyarakat mengetahui juga digunakan dalam upaya membangun citra positif pemerintah di mata masyarakat.

b. Tugas Humas Pemerintahan

Pada umumnya Humas bertugas memberikan informasi dan penjelasan kepada khalayak atau publik mengenai kebijakan dan langkah-langkah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah serta mengusahakan tumbuhnya hubungan harmonis antara lembaga dan publiknya serta memberikan pengertian kepada masyarakat terkait apa yang dikerjakan oleh instansi pemerintah, dimana humas tersebut berada dan berfungsi. Humas menjadi palang pintu hubungan yang harmonis antara Pemerintah dengan publik atau masyarakat.

Dalam kehumasan, tidak hanya ada public realitions perusahaan, tetapi ada juga public realitions government. Ada beberapa tugas dalam public realitions atau humas pemerintah, yaitu:

- 1) Mengamankan kebijakan pemerintah
- 2) Memberikan pelayanan dan menyebarluaskan pesan atau informasi
- 3) Menjadi komunikator dan mediator dalam menjembatani kepentingan instansi serta menampung aspirasi dan memperhatikan apa yang diinginkan masyarakat
- 4) Berperan serta dalam menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis demi stabilitas dan kemandirian politik serta membantu pemerintah dalam mewujudkan program pembangunan nasional.

Dari paparan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa humas memiliki tugas dan juga fungsi penting dalam meningkatkan kinerja pemerintah dalam menyebarluaskan informasi-informasi kebijakan publik atau masyarakat. Humas berperan untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat.

### 3. Cyber Public Realitions

#### a. Definisi Cyber Public Realitions

Seiring dengan perkembangan zaman mendorong teknologi komunikasi terus berkembang pesat. Banyak media yang telah digunakan untuk mendukung penyampaian pesan. Mulai dari teknologi telepon seluler atau yang kita kenal dengan istilah handphone hingga media cyber atau internet. Sedangkan media konvensional seperti surat kabar, radio dan televisi juga semakin berkembang. Meskipun media modern seperti media *cyber* hadir dengan gencarnya, tapi media konvensional ini masih banyak digunakan dan efektif untuk menjangkau dari berbagai kalangan. Hal ini dikarenakan masing-masing media memiliki kelebihan dan karakteristik yang berbeda. Media *cyber* atau media internet

sebagai media baru atau *new* media sangat diminati oleh masyarakat.

Media cyber disebut pula sebagai media kontemporer yang bersifat online atau lebih populer dengan sebutan cyber PR, yaitu pelaksanaan kegiatan PR dengan menggunakan fasilitas jaringan internet. Internet dimanfaatkan karena dapat menjangkau masyarakat luas dan di seluruh dunia, sehingga dengan adanya teknologi internet, dunia menjadi lebih sempit dan ini adalah kesempatan yang bagus untuk memudahkan PR bekerja.

Gambaran mengenai perkembangan teknologi komunikasi yang begitu pesat secara tidak langsung menuntut seorang *Public Relations* untuk segera beradaptasi dan dimanfaatkan sehingga memudahkan aktivitasnya. Efisiensi waktu sangatlah dibutuhkan oleh seorang PR, untuk itulah teknologi membantu PR dalam dalam mengatasi masalah tersebut. Implementasi teknologi komunikasi menyebabkan perubahan yang lebih baik dalam keaktualan seorang PR dalam menyebarkan informasi. Teknologi yang kerap digunakan seorang PR adalah internet. Internet merupakan alat komunikasi yang murah dan dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Kemampuan internet yang dapat diakses dimanapun, memudahkan PR dalam berbagai aktivitas dalam perusahaan yang dikemas oleh PR dan dapat disebarkan melalui internet.

Menurut Onggo, (2004:2-7) Cyber Public Relations adalah kegiatan PR yang menggunakan internet sebagai media komunikasi. Media internet dimanfaatkan oleh PR untuk membangun merek atau *brand* dan memelihara kepercayaan publik. Adapun kelebihanannya dinilai komunikasinya konstan, karena internet bekerja selama 24 jam selama 7 hari dengan potensi target publik seluruh dunia. Selain itu, respon yang cepat sehingga tidak perlu membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan jawaban atau balasan dari informasi yang disampaikan.

Seorang PR tidak hanya menjadi juru bicara bagi perusahaannya, namun kini PR juga harus dapat membangun dan menjaga hubungan baik dengan khalayak perusahaan, yang memberikan kontribusi positif bagi perusahaan atau instansi. Seiring berkembangnya teknologi komunikasi, seorang PR juga harus dapat memanfaatkan teknologi yang ada masa kini untuk memudahkan pekerjaan yang menuntut seorang PR siaga 24 jam. Peranan teknologi komunikasi bagi seorang PR tentulah sangat besar. Salah satu tugas PR adalah sebagai pusat penyebaran informasi, dengan memanfaatkan perkembangan teknologi maka akan dengan mudah bagi seorang PR untuk menciptakan komunikasi yang efektif dan hal tersebut tentu saja akan memberikan keuntungan bagi perusahaan atau instansi.

Salah satu keuntungan dari kehadiran teknologi komunikasi untuk kegiatan PR, yakni kemudahan PR mendapatkan umpan balik atau *feedback* dari stakeholdernya. Teknologi komunikasi membuat jarak dan waktu tidak mengenal batasan. Dengan adanya teknologi komunikasi seperti media sosial, seorang PR dapat mencari dan mengetahui opini publik, apa yang diinginkan dan apa yang dikeluhkan publik mengenai perusahaan atau instansi tersebut.

#### 4. Public Relations Jurnalistik

Pengertian jurnalistik secara terminologis (istilah) atau definisi jurnalistik sangat banyak.

Menurut Muis dalam *Jurnalistik Hukum Komunikasi Massa* (Jakarta: PT. Dharu Annutama:1999), cukup banyak definisi tentang jurnalistik, namun secara umum definisi tersebut memiliki kesamaan, yaitu memasukkan unsur media massa, penulisan berita, dan waktu yang tidak tertentu (aktualitas).

Menurut Edwin Emery dalam *Introduction to Mass Communication* (New York: Harper & Row, 1976), jurnalistik selalu harus ada unsur kesegaran waktu (*timeliness* atau aktualitas).

Oleh sebab itu jurnalis memiliki dua fungsi utama, yaitu untuk melaporkan berita dan untuk membuat interpretasi serta memberikan pendapat berdasarkan berita yang dilaporkannya.

Menurut Onong U Effendi: jurnalistik merupakan sebuah teknik dalam mengelola berita, mulai dari mendapatkan bahan (berita) hingga menyebarkannya kepada masyarakat secara luas.

Dalam konteks dunia Public Relations, jurnalistik menjadi salah satu bidang atau keahlian yang harus dikuasai seorang PR. Kemampuan dalam bidang jurnalistik tidak dapat dipungkiri menjadi modal seseorang untuk menjadi PR yang handal. Dengan perkembangan zaman, kegiatan jurnalistik adalah kegiatan mengumpulkan, menyiapkan, menuliskan, dan menyebarluaskan informasi melalui media massa. Sedangkan jurnalisme adalah pekerjaan mengumpulkan, menulis, mengedit, dan menerbitkan berita.

Seorang Public Relations adalah ujung tombak sebuah perusahaan dimana citra organisasi menjadi tanggung jawab seorang PR. Oleh karena itu, Public Relations berhubungan langsung dengan media massa. Public Relations juga dituntut agar dapat menulis press release yang benar karena press release yang memuat berita dari organisasi akan menjadi konsumsi publik maka dari itu Public Relations memerlukan kemampuan jurnalistik yang baik.

Kecakapan yang dituntut dari jurnalis pada era digital juga berubah. Lebih berat pada zaman kejayaan media cetak, antara lain yaitu:

- a. Jurnalis media daring harus mampu menggunakan berbagai alat multimedia untuk mendukung penyampaian cerita.
- b. Secara umum, penulisan teks media daring lebih ringkas daripada media cetak, tetapi lebih panjang daripada radio dan televisi. Disinilah menulis secara lebih efisien menjadi lebih penting. Semakin lama, bahasa media daring menjadi semakin informal, tetapi tetap baik dan efisien.



c. Jurnalis harus bekerja cepat, meskipun kecepatan bukan segalanya, bergantung dengan target khalayak dan kebijakan tiap redaksi. Kecepatan bukanlah satu-satunya keunggulan media daring. Seperti halnya media cetak, ada beragam jenis dan segmentasi bagi media daring.

#### 5. Kemampuan Public Relations

Dari paparan di atas tampak bahwa sebagian besar tugas *Public Relations* (PR) adalah berkaitan dengan keahlian tulis-menulis. Bahkan perpaduan tugas dan tanggung jawab PR untuk satu organisasi dengan lainnya mungkin berbeda, tetapi kegiatan menulis selalu ada. Tidak heran jika salah seorang praktisi Public Relations, Wicaksono Noeradi (pakar PR senior) mengatakan bahwa 70% kegiatan komunikasi Public Relations adalah menulis sisanya kegiatan komunikasi lainnya.

Seorang PR bertugas membuat macam-macam media komunikasi. Tujuannya untuk sarana komunikasi dua arah dengan publiknya. Melalui media komunikasi tersebut, semua program PR bisa menyebar dan dipahami publik. Media komunikasi PR antara lain *newsletter*, buletin, majalah dinding, *company profile*, *press release*, naskah pidato, *annual report* maupun iklan korporat. Media komunikasi tersebut bisa menggunakan media cetak, audio-visual atau pun internet.

Seorang Public Relations yang profesional harus memiliki keahlian menulis. Fraser P. Seitel mengatakan bahwa menulis adalah kunci Public Relations meskipun saat ini adalah era komputer. Kemampuan menulis yang mudah, lancar dan cepat mampu membedakan antara seorang PR dengan ahli-ahli lain dalam instansi atau organisasi. Secara umum, *Public Relations Writing* merupakan aktivitas menulis yang didesain untuk membangun dan menjaga hubungan positif dengan publik yang dapat memengaruhi organisasi. Karena itu, tujuannya adalah menginformasi dan memengaruhi sikap dan perubahan bentuk perilaku publik.

Media komunikasi Public Relations berisi produk-produk tulisan. Media tulisan dipilih karena sifatnya yang terekam dan dapat diulang-ulang dengan mudah. Saat ini, produk-produk tulisan PR tidak hanya bisa disampaikan melalui media konvensional tapi juga media kontemporer. Media konvensional adalah media yang kita kenal selama ini, seperti media cetak (suara kabar, majalah) dan media elektronika (radio serta televisi). Kehadiran internet merupakan keniscayaan yang tidak bisa dihindari praktisi PR. Saat ini dikenal luas praktik Public Relations dengan menggunakan internet sebagai media penyampai informasi. Inilah yang dikenal dengan istilah “*Public Relations in the Net*” atau “*Electronic Public Relations (E-PR)*”. Perkembangan teknologi komunikasi yang pesat (audio visual maupun internet) tidak dapat menggantikan peran penting kegiatan menulis. Tulisan menjadi dasar bagi produksi pesan di media lain, seperti radio atau audio-visual. Membuat company profile audio visual, misalnya, perlu tulisan *script* atau skenario tentang apa saja yang diucapkan narator. Sering dijumpai tulisan dalam media cetak menjadi sumber informasi bagi tayangan berita di radio atau televisi.

#### 6. Menulis Berita

Pada dasarnya, sebagian besar produk tulisan Public Relations (PR) adalah produk berita. *Press-release* adalah berita, isi *newsletter* adalah berita atau isi *company profile* adalah berita. Karena itu, produk tulisan PR harus mengandung “berita” bagi publik. Berita adalah segala sesuatu yang hangat, faktual serta menarik perhatian sejumlah orang. Lord Northcliffe mengatakan berita adalah sesuatu yang tidak biasa (*news is anything out of ordinary*), Walkley menyebut sebagai berita sebagai tulisan yang digabungkan dengan unsur kejutan (*combined with the element of surprise*). Berita harus menarik.

Public Relations adalah sumber berita bagi publik, khususnya media massa. Segala tulisan yang dikirim PR ke media harus bernilai berita. Karena itu wawasan PR dalam memahami teknik-teknik

jurnalistik (membuat berita) mutlak diperlukan. Adapun karakteristik berita yang sebaiknya dibuat praktisi Public Relations adalah :

a. Berita itu objektif

Objektivitas berita adalah ukuran baik tidaknya sebuah berita sesuai kaidah-kaidah jurnalistik. Objektivitas berita mencakup dua hal, yaitu :

1) *Faktualitas*, berita harus berdasarkan fakta bukan karangan atau opini wartawan. Ciri-ciri sebuah berita yang faktual adalah :

- Berita mengandung kebenaran (*truth*). Fakta dalam berita harus dapat dikonfirmasi ulang atau dicek dengan sumber berita. Bila berita mengandung kebenaran maka bisa disebut akurat. Akurat juga mengandung arti bahwa berita harus cermat dan tepat.
- Tidak mencampurkan antara fakta dengan opini pribadi wartawan. Fakta adalah hasil pengamatan dan wawancara wartawan. Sedangkan opini adalah pendapat yang berisi nilai-nilai pribadi wartawan.
- Berita harus lengkap (*completeness*), artinya dibangun atas unsur-unsur berita yang lengkap, yaitu 5W+1H (*what, who, when, where, why, how*).
- Berita harus relevan (*relevance*) dengan kondisi saat berita itu disebarkan, artinya si pembuat berita harus mempertimbangkan dampak berita bagi publik.
- Berita harus informatif (*informativeness*), artinya mampu memberikan informasi yang jelas dan lengkap mengenai peristiwa yang diberitakan.

2) *Imparsialitas*, berita mesti tidak berpihak pada golongan tertentu dan tidak sepotong-potong dalam memberitakan peristiwa.

b. Narasumber Kredibel

Berita yang baik adalah berita yang menampilkan narasumber atau sumber berita yang terjamin kapabilitasnya dalam memberikan kesaksian atau informasi tentang peristiwa yang diberitakanya. Narasumber yang dipilih haruslah yang memiliki keahlian dibidangnya, keterkaitannya dengan peristiwa dan bisa dipercaya.

c. Berita Harus Bernilai (memiliki news-values/newsworthy)

Agar menarik minat khalayak untuk membacanya, berita harus mengandung nilai berita (news values). Bagi seorang PR, nilai berita ini penting sewaktu membuat press release yang dikirim ke media. Semakin media menganggap berita yang disampaikan melalui press release itu menarik (mempunyai nilai jual) maka semakin besar untuk dapat dimuat.

Profesor Linda Morton dari Univesity of Oklahoma's Herbert School of Journalism menyarankan lima topik yang layak diberitakan pada sebuah rilis berita:

- 1) Pengaruh, pengumuman penting yang mempengaruhi suatu organisasi, komunitasya, atau bahkan masyarakat.
- 2) Fenomena, sebuah kejadian atau peringatan yang tidak biasa, seperti pelanggan ke-stu-juta yang bergabung dengan suatu organisasi.
- 3) Konflik, sebuah perselisihan atau kontrversi besar, seperti protes pekerja atau penolakan sebuah yang populer.
- 4) Prinsip yang diketahui, semakin tinggi gelar individu yang membuat pengumuman – presiden versus wakil presiden – semakin besar kemungkinan terbit rilis tersebut.
- 5) Kedekatan, seberapa lokalkah kita rilis tersebut atau seberapa tepat waktunyakah rilis tersebut, sehubung dengan berita hari itu.

Terlepas dari keharusan untuk layak diberitakan, rilis berita harus menyertakan beberapa inti yang dapat membantu rilis tersebut dipertimbangkan untuk dicetak.

1) Rasional

Harus ada alasan pengiriman rilis yang jelas. Pokok dari rilis harus relevan terhadap pembaca atau pemeriksa dari media yang ditargetkan

2) Fokus

Masing-masing rilis harus hanya membicarakan satu subjek inti. Kurangnya fokus – mendiskusikan banyak hal berbeda akan membuat rilis tidak diterbitkan

3) Tidak melebihi-lebihkan

Memprafasakan komentator Fox News Bill O'Reilly, rilis haruslah merupakan "zona bebas hiperbola". Dengan segala cara, hindari kata kunci dan istilah tabu yang dituliskan di dalam kotak di Luar Garis Berikutnya.

4) Kutipan bermakna

Sertakan kutipan, tetapi pastikan kutipan tersebut bermakna. Ini akan menambah nilai cerita dengan memberikan proyeksi penting yang akan membantu rilis berita dalam konteks korporat.

5) Deskripsi perusahaan

Banyak wartawan yang mungkin tidak familier dengan suatu organisasi dan bisnis yang mereka lakukan. Oleh karena itu, sebuah deskripsi singkat mengenai organisasi, umumnya disebut sebagai *boilerplate*, sangat penting untuk disertakan di dalam sebuah rilis. Boilerplate terbaik harus menyertakan posisi pasar, cakupan aktivitas bisnis, jangkauan geografis, tujuan, ukuran, dan bahkan budaya perusahaan.

6) Ejaan, tata bahasa, tanda baca

Dalam penulisan rilis pun sudah pasti penting dalam pemilihan kata dan tanda baca, agar rilis mudah dipahami dan formal dalam penulisannya.

7. Press Release

*Press Release* juga dikenal dengan istilah *news-release* atau siaran pers. Ini merupakan produk tulisan yang paling banyak dibuat oleh praktisi PR. Fungsinya adalah sebagai sarana informasi tentang kegiatan PR yang dikirimkan ke media, dengan maksud agar informasi yang ada dalam press release dimuat dalam bentuk berita oleh media.

*Press Release* bisa disebut *release/* rilis adalah sebuah berita atau informasi yang disusun oleh sebuah organisasi yang menggambarkan kegiatannya. Definisi lain tentang *press release* :

*“Press Release is pseudo news story that seeks to demonstrateto an editor or reporter the newsworthiness of a particular person, event, service or product,; Press-release is simply a statment preparedfor distribution to the media. The purpose of a press release is to give journalist informastion that is useful, accurate and interesting”.*

Jadi, pada dasarnya *press-release* merupakan berita tentang perusahaan (individu, kegiatan, pelayanan atau produk). Berita tersebut dikirimkan atau disiarkan ke media (pers), sehingga disebut juga siaran pers atau *news-release*.

Salah satu hal yang dilakukan PR adalah membuat press release di website. PR dapat membuat press release secara lebih bebas, lebih panjang, dan detail, bila menggunakan media website. Karena halaman website yang luas memungkinkan menulis lebih detail dan panjang, jika wartawan membuka website instansi artinya wartawan lebih proaktif mencari informasi. Diasumsikan, dalam situasi saat ini, mereka mempunyai cukup waktu untuk menggali informasi lebih detail.

Secara umum press release dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis basic publicity, product release, dan financial release. Menurut Thomas Bivins, terdapat tiga jenis press release yang berdasarkan kepada penekanan topic (key-issue) yang ditampilkan, yaitu:

1. Basic Publicity Release

Topic press release jenis ini adalah segala informasi yang dinilai mengandung nilai berita bagi media massa. Praktisi PR harus pandai dalam membuat berita, dengan cara membuat event-event yang menarik.

2. Product Release

Press release ini berisi informasi tentang produk perusahaan.

3. Financial Release

Tidak semua perusahaan menganggap penting informasi jenis ini. Informasi keuangan biasanya dianggap tabu untuk menjadi konsumsi umum. Sekarang, bukan hanya pemegang saham yang berhak atas informasi ini, tetapi publik pun juga berhak disodori informasi keuangan.

Menurut Bivins, mengemukakan format standar press release berdasarkan konvensi para praktisi PR yang tergabung dalam suatu asosiasi sebagai berikut:

1. Tipe penulisan press release harus jelas, ditulis di kertas surat tanpa hiasan di pinggir kertasnya.
2. Margin adalah satu untuk satu dan setengah inci untuk semua bagian.
3. Alamat pengiriman diletakkan di sudut kiri atas halaman utama. Ditandai dengan blok termasuk alamat lengkap, nama kontak person, biasanya orang yang menulis press release dan nomor

telepon, nomor telepon hotline yang biasa dihubungi kapan. Perlu diingat bahwa redaksi ingin memuat press release anda dan meminta informasi lebih lanjut.

4. Tanggal release tertera di margin kanan, sedikit lebih ke bawah dibandingkan margin bawah alamat yang diblok. Bagian ini memberikan kepastian informasi bagi redaksi dan waktu yang tepat untuk pemuatannya.
5. Penulisan judul ditulis dalam satu spasi dan digaris bawahi.
6. Tubuh atau uraian press release ditulis dalam dua spasi.
7. Jika lebih dari satu halaman, press release dibawah halaman dalam more (lagi-lagi) diletakkan dalam kurung atau tanda garis pisah.
8. Halaman-halaman berikutnya ditandai dengan slug-line (kode) diikuti beberapa garis pemisah. Nomor halaman pada kiri atas.
9. Akhir dari suatu tulisan press release ditandai dengan beberapa cara misalnya membubuhkan kata "end" (tamat).

## 8. Langkah-Langkah Melakukan Peliputan

Meliput atau reporting pada dasarnya adalah kegiatan pengumpulan data yang terbagi menjadi dua, yaitu wawancara dan observasi. Hal liputan sering kali didukung dengan pencarian data sekunder, yakni dari internet ataupun sumber pustaka lainnya.

Target liputan adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa dan tanggapan orang-orang terhadapnya. Saat mempeiapkan dan mengumpulkan data, penting bagi jurnalis untuk selalu mengingat



tujuan akhirnya, yakni liputan berita. Adapun langkah-langkah melakukan peliputan adalah sebagai berikut :

a. Melakukan riset pendahuluan dan menentukan fokus cerita

Pertama mencari berita-berita terkait hal/kegiatan tersebut, kemudian membaca beragam berita/ artikel nonberita tentang topik tersebut. Mencari berbagai fakta dan opini yang bernilai berita. Setelah meriset, menyusun daftar pertanyaan dan calon sumber.

b. Mengumpulan data

Setelah melakukan studi pustaka, melakukan peliputan untuk mengumpulkan data di lapangan, yaitu melalui wawancara dan observasi. Selain itu juga melakukan pengambilan data dan video sebagai dokumentasi.

c. Meuliskan liputan

Setelah memperoleh data di lapangan ataupun sumber lain, selanjutnya bisa mengolah data tersebut menjadi rancangan tulisan.

## 9. Tantangan Public Relations di Masa Mendatang

Kebutuhan dan tuntutan kerja PR dari waktu ke waktu akan selalu berubah, dan trennya semakin menantang sehingga menuntut proses kerja yang profesional. Oleh karena itu, seorang Public Relations benar-benar harus “update” mengikuti perkembangan sehingga dapat membantu memberikan pengetahuan tentang cara kerja yang dapat mendukung profesionalisme seorang *Public Relations*. Misalnya, hadirnya teknologi *Cyber Public Relations* atau teknologi internet sudah berkaitan dengan cara kerja *Public Relations*.

Seorang Public Relations harus mampu membuat, merancang, dan mengelola setiap kegiatan yang akan diambil dengan mempertimbangkan beberapa hal termasuk di dalamnya adalah tebaran presentase dari cara berpikir seorang PR. Harus disadari bahwa cara kerja saat ini dan masa mendatang sangat membutuhkan strategi yang

tepat dalam mengambil sikap atau keputusan. Salah satu strategi yang perlu dipertimbangkan adalah hadirnya era digital yang sudah membatu cara kerja PR.

Public Relations yang diharapkan di masa mendatang adalah PR yang piawai dalam membangun strategi Public Relations sebagai cara, teknik atau seni PR dalam menyelesaikan atau mencari jalan keluar dari persoalan pada situasi kerja. Bahkan Jhinbell menargetkan sebesar 20% cara kerja Public Relations harus dilakukan dengan strategi yang tepat. Tentu saja jika pelaksanaan dari strategi diperlukan alat atau *tools* yang dipilih secara tepat agar hasilnya pun efektif, diantara alat yang digunakan adalah media massa.

### **BAB III**

#### **DESKRIPSI ORGANISASI**

##### **A. SEJARAH PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Daerah Istimewa Yogyakarta keberadaannya dalam konteks historis dimulai dari sejarah berdirinya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berdasarkan Perjanjian Giyanti 1755. Berawal dari sini muncul suatu sistem pemerintahan yang teratur dan kemudian berkembang, hingga akhirnya sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan suatu bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat didirikan pada tahun 1755 oleh Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwono I, sedangkan Kadipaten Pakualaman didirikan pada tahun 1813 oleh Pangeran Notokusumo (saudara Sultan Hamengku Buwono II) yang bergelar Adipati Paku Alam I.

Sejak berdirinya, baik Kasultanan maupun Kadipaten adalah pemerintahan kerajaan yang diakui kedaulatannya. Pada masa kolonial Belanda, pemerintahan di Kasultanan Yogyakarta diatur kontrak politik yang dilakukan pada tahun 1877, 1921, dan 1940, antara Sultan dengan Pemerintah Kolonial Belanda. Hal ini menunjukkan bahwa Keraton tidak tunduk begitu saja kepada Belanda. Pemerintah Hindia Belanda mengakui Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman sebagai kerajaan yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahannya sendiri yang dikenal dengan istilah *zifbesturende landschappen*. Kontrak politik terakhir Kasultanan Ngayogyakarta tercantum dalam *Staatsblaad* 1941 Nomor 47, sedangkan kontrak politik Kadipaten Pakualaman dalam *Staatsblaad* 1941 Nomor 577.

Pada masa pendudukan Jepang, Yogyakarta diakui sebagai Daerah Istimewa atau *Kooti* dengan *Koo* sebagai kepalanya, yakni Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Di bawah *Kooti*, secara struktural ada wilayah-wilayah pemerintahan tertentu dengan para pejabatnya.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII menyatakan kepada Presiden RI bahwa Daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Daerah Kadipaten Pakualaman menjadi wilayah Negara RI, bergabung menjadi satu kesatuan yang dinyatakan sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Hal tersebut dinyatakan dalam:

1. Piagam Kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 19 Agustus 1945 dari Presiden RI;
2. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 5 September 1945 (dibuat secara terpisah);
3. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 30 Oktober 1945 (dibuat dalam satu naskah);

Keunikan pengalaman Yogyakarta merupakan salah satu fakta yang menjadikannya sebagai daerah istimewa. Dalam proses perkembangan pemerintahannya, Yogyakarta berproses dari tipe pemerintahan feodal dan tradisional menjadi suatu pemerintahan dengan struktur modern.

Dalam perkembangan dan dinamika negara bangsa terdapat keterkaitan yang erat antara Republik Indonesia dan DIY. Entitas DIY mempunyai aspek politis-yuridis berkaitan dengan sejarah berdirinya yang merupakan wujud pengintegrasian diri dari sebuah kerajaan ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan respons atas eksistensi DIY dan juga merupakan pengakuan kewenangan untuk menangani berbagai urusan dalam menjalankan pemerintahan serta urusan yang bersifat khusus. Undang-Undang ini telah diubah dan ditambah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819) yang sampai saat ini masih berlaku. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa DIY merupakan daerah setingkat provinsi dan meliputi bekas Daerah

Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Daerah Kadipaten Pakualaman. Pada setiap Undang-Undang yang mengatur Pemerintahan Daerah, dinyatakan keistimewaan DIY tetap diakui.

Dalam rangka perubahan dan penyesuaian serta penegasan Keistimewaan DIY Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 13/2012 Tentang Keistimewaan DIY yang disahkan 31 Agustus 2012 dan diundangkan pada tanggal 3 September 2012.

Pengaturan Keistimewaan DIY bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan demokratis, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat, menjamin ke-bhineka-tunggal-ika-an, dan melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Pengaturan tersebut berlandaskan atas pengakuan atas hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi, kebhineka-tunggal-ika-an efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional dan pendayagunaan kearifan lokal. Oleh karenanya dengan memperhatikan aspek historis, sosiologis, dan yuridis substansi Keistimewaan DIY diletakkan pada tingkatan pemerintah provinsi.

Kewenangan dalam urusan Kestimewaan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 2 meliputi : tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; kebudayaan; pertanahan; dan tata ruang. Dengan demikian, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang meliputi kewenangan urusan Keistimewaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 dan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Sesuai dengan UU No 32 tahun 2004, maka posisi DIY sebagai daerah yang setara dengan provinsi mengandung arti bahwa Gubernur merupakan Kepala Daerah Otonom dan sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah.

## Visi dan Misi Pemda DIY

### **Visi Pemda DIY**

Bertitik tolak dari dasar filosofi **Hamemayu Hayuning Bawana**, sebagai cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta yang berdasarkan nilai budaya, maka visi pembangunan DIY yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun mendatang adalah **“Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”**

1. Yogyakarta akan bertindak secara aktif mengisi kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat oleh Pemerintah Indonesia dalam kerangka Perjanjian IORA (Indian Ocean Rim Association), untuk mengembangkan Wilayah Yogyakarta Bagian Selatan semata-mata untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia Jogja secara keseluruhan, baik tinggal di Wilayah Selatan maupun tinggal di Wilayah lain di seluruh Yogyakarta. Peningkatan harkat dan martabat manusia Jogja mencakup pengertian peningkatan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan sosial dan beradab.
2. Semangat “Perjumpaan” dan “Silang Ekonomi” akan diletakkan sebagai strategi kebudayaan untuk mengatasi kesenjangan dan kemiskinan yang masih menggelayut di Wilayah Yogyakarta secara keseluruhan, dalam kerangka meningkatkan harkat dan martabat manusia Jogja, melalui langkah-langkah perjumpaan dan saling silang: antara pelaku ekonomi kuat dengan ekonomi lemah, antara pelaku ekonomi perkotaan dengan pelaku ekonomi pedesaan, antara pelaku ekonomi modern dengan pelaku ekonomi tradisional, antara pelaku ekonomi bermodal besar dengan pelaku ekonomi bermodal kecil, dan antara pelaku ekonomi internasional dengan pelaku ekonomi lokal. Pendek kata, melalui “Strategi Perjumpaan dan Saling Silang”, maka dalam Lima Tahun ke depan, pembangunan ekonomi di Wilayah Yogyakarta diarahkan untuk tidak saja meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga harus mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama masyarakat

- berpenghasilan rendah dan masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat yang kurang beruntung.
3. Semangat “Perjumpaan” dan “Silang Keruangan Wilayah” akan diletakkan sebagai strategi untuk memajukan wilayah-wilayah pinggiran melalui silang infrastruktur wilayah, sehingga interkoneksi antara pemukiman-pemukiman terpencil dengan pusat-pusat pelayanan masyarakat akan terbangun secara baik, termasuk “silang kerjasama infrastruktur” dengan wilayah-wilayah kabupaten tetangga terutama untuk wilayah-wilayah tersulit karena faktor topografi.
  4. Semangat “Perjumpaan” dan “Silang Birokrasi” akan diletakkan sebagai strategi untuk menciptakan program-program besar yang memiliki kapasitas dan dampak besar bagi perubahan-perubahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga kedepan, harus dikurangi terciptanya banyak program-program kecil berbiaya besar, untuk kemudian digantikan dengan program-program besar berdampak besar melalui program-program berbasis “Silang SKPD”. Dengan perkataan lain, ke depan program-program “Silang SKPD” yang berbasis “Tema-tema Besar” akan didorong prioritasnya dibanding dengan program-program kecil berbasis SKPD tunggal.
  5. Semangat “Perjumpaan” dan “Silang Birokrasi” akan diletakkan sebagai strategi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang demokratis, baik melalui “strategi silang vertikal” (keterbukaan di internal SKPD), “strategi silang horisontal” (keterbukaan antar SKPD), dan “strategi silang heteraki” (gabungan keterbukaan vertikal dan horisontal antar SKPD).
  6. Semangat “Perjumpaan dan "Silang Kelembagaan" akan diletakkan sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur sipil negara, melalui "silang belajar" ke lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun di luar Lembaga Pemerintahan DIY, termasuk lembaga pendidikan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga perekonomian swasta, serta belajar dari pengalaman-pengalaman

daerah dan negara lain, dalam rangka menciptakan "Trilogi SDM-DIY" atau "E2-K" yakni: ETOS, ETIKA, dan KUALITAS. . Etos, dalam konteks Trilogi SDM-DIY menyanggah pesan perubahan persepsi (mind set) dari tugas birokrasi sebagai pekerjaan kantoran, menjadi tugas birokrasi sebagai "karya peradaban", yang menyanggah arti bahwa semua karya pelayanan birokrasi adalah "karya peradaban", karena tanpa kontribusi karya pelayanan birokrasi peradaban di DIY tentu tidak akan berkembang menjadi peradaban seperti yang dapat kita saksikan hari ini. Etika, dalam konteks Trilogi SDM-DIY menyanggah pesan "kemuliaan" dalam pengertian bersatunya "pikiran mulia, niat mulia, dan tindakan mulia", dalam rangka menciptakan SDM yang "berintegritas" yang menjunjung tinggi budaya malu dan budaya merasa bersalah apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan. Kualitas, dalam konteks Trilogi SDM-DIY menyanggah pesan adanya pergeseran mind set, bahwa karya birokrasi bukanlah dipersepsi hanya sebagai "karya proyek berbasis kinerja penyerapan anggaran", melainkan menuju pada pembentukan "sikap" bahwa karya birokrasi DIY adalah "karya yang dapat menjadi rujukan" bagi birokrasi-birokrasi dan lembaga-lembaga lain di tempat lain (nasional maupun internasional). Ketika karya tersebut menjadi "rujukan", maka karya tersebut merupakan karya yang berkualitas, yang merupakan hasil dari karya yang "diniati" untuk menjadi "karya berkualitas tinggi". Untuk itu, membangun birokrasi dengan "Ruh budaya karya berkualitas tinggi" akan menjadi penting bagi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Lima Tahun ke depan. Ketiga aspek "Trilogi SDM-DIY", merupakan satu kesatuan yang utuh.

7. Semangat "Perjumpaan" dan "Silang Budaya" akan diletakkan sebagai strategi untuk meningkatkan harmoni kehidupan bersama masyarakat Yogyakarta, melalui program-program saling silang perjumpaan antara: (i) budaya Jawa dengan budaya-budaya etnik lain yang ada di Yogyakarta, (ii) antara budaya Jawa dengan budaya



antar bangsa termasuk dengan budaya-budaya bangsa yang tergabung dalam IORA (Yogyakarta berpotensi sebagai "Hub" atau pusat budaya IORA), (iii) silaturahmi budaya antar kelompok agama yang ada di Yogyakarta dan Indonesia, (iv) program silang belajar antar sekolah pada kelas-kelas awal sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas untuk "saling kenal sekolah" sehingga mata rantai tradisi dan sejarah pertikaian atau tawuran antar sekolah tertentu dapat diputus.

### **Misi Pemda DIY**

Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditempuh melalui misi "Lima Kemuliaan" atau "Pancamulia" yakni :

1. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup - kehidupan - penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan ketrampilan sumberdaya manusia Jogja yang berdaya saing,
2. Terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan,
3. Terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan,
4. Terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, dan
5. Terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

## B. Arti Logo Pemda DIY



Gambar 3.1 Logo Pemda DIY

Sumber: [www.jogjaprov.go.id](http://www.jogjaprov.go.id)

Lambang Daerah Istimewa Yogyakarta mengandung makna sebagai berikut:

1. Landasan Idiil Pancasila :
  - a. Ke-Tuhanan Yang Maha Esa dilukiskan dalam gambar bintang emas persegi lima;
  - b. Perikemanusiaan dilukiskan dalam tugu (saka guru) dalam sayap;
  - c. Persatuan dilukiskan dalam gambar bulatan (lingkaran) berwarna merah dikelilingi lingkaran berwarna putih;
  - d. Kerakyatan dilukiskan dalam gambar ompak dengan tatanan bunga teratai;
  - e. Keadilan sosial dilukiskan dalam gambar padi dan kapas;
2. Landasan Struktural Undang - Undang Dasar 1945 dilukiskan dalam gambar bunga kapas berjumlah 17 kuntum, daun kapas berjumlah 8 dan padi sewuli yang berisi 45 butir.
3. Tat kehidupan gotong royong dilukiskan dalam gambar bulatan yang dalam bahasa Jawa disebut "golong" dan tugu berbentuk silinder yang dalam bahasa Jawa disebut "gilig", sehingga perpaduan dua gambar itu melambangkan semangat yang "golong-gilig".

4. Nilai-nilai keagamaan pendidikan dan kebudayaan dilukiskan dalam gambar bintang emas persegi lima, bunga melati yang mencapai bintang dengan daun kelopak 3 helai.
5. Semangat perjuangan dan kepahlawanan dilukiskan dalam gambar warna merah dan putih dengan gambar tugu tegak lurus, berarti dengan jiwa yang teguh berjuang dengan gagah berani mencapai tujuan yang suci.
6. Semangat pembangunan dilukiskan dalam gambar tataan miring pada soko guru, tataan spesifik Yogyakarta, yang berarti menghias, membangun diidentikkan dengan menghias memperlengkapi dengan alat-alat yang tak dimiliki sebelumnya.
7. Sejarah terbentuknya Daerah Istimewa Yogyakarta dilukiskan dengan sayap mengembang berbulu 9 helai di bagian luar dan 8 helai di bagian dalam, menggambarkan peranan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII, yang pada tanggal 5 September 1945 mengeluarkan amanatnya untuk menggabungkan daerah Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Keadaan alam dilukiskan dalam gambar warna-warna hijau tua dan hijau muda dan lukisan bentuk stiler bunga teratai, untuk menggambarkan kesuburan alam (hijau) dan kesuburan jiwa (bunga teratai).
9. Candrasengkala : “RASA SUKA NGESTI PRADJA” – tahun 1786;  
Surjasengkala : “YOGYAKARTA TRUS MANDIRI” – tahun 1945;  
Sehingga bila dirangkaikan seluruhnya berbunyi :  
“RASA SUKA NGESTIPRADJA YOGYAKARTA TRUS  
MANDIRI” yang berarti : “DENGAN RASA GEMBIRA  
MEMBANGUN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA YANG  
BAIK DAN SELAMAT TRUS BERDIRI TEGAK”.

10. Persatuan dan kesatuan Indonesia yang kokoh kuat dilukiskan dalam gambar lingkaran/bulatan dan tugu yang tegak lurus, menggambarkan falsafah hidup yang selalu golong gilig.
11. Masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dilukiskan dalam gambar padi sewuli dengan 45 butir padi (pangan) dan kapas yang berbunga 17 kuntum dan berdasar 8 helai, angka-angka mana menggambarkan angka 17 Agustus 1945 yaitu tanggal proklamasi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Undang-Undang Dasar 1945.

**a. Kelembagaan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 5 tahun 2008 pasal 1 menyatakan bahwa :

1. Sekertariat Daerah merupakan unsur staf yang membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah.
2. Sekertariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
3. Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atau usul Gubernur dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat.

**b. Tugas Sekretaris Daerah**

Sekretariat Daerah mempunyai tugas menyusun kebijakan pemerintah daerah, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, serta melaksanakan pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah.

**c. Fungsi Sekretaris Daerah**

Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan program lingkup Sekretariat Daerah.

2. Perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
4. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah.
5. Penyelenggaraan pembinaan administrasi pemerintahan dan aparatur pemerintah daerah.
6. Pengelolaan sarana dan prasarana Pemerintah Daerah.
7. Pengelolaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan keuangan Sekretariat Daerah,
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

**d. Susunan Organisasi**

Unsur Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

1. Pimpinan : Sekretaris Daerah
2. Pembantu Pimpinan : Asisten Sekretaris Daerah
3. Pelaksana : Biro-biro yang terdiri dari bagian-bagian dan bagian-bagian yang terdiri dari subbagian-subbagian.
4. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Biro Umum, Humas dan Protokol merupakan unsur Pelaksana dibawah Asisten Administrasi Umum, yang terdiri dari :

a) Bagian Administrasi, terdiri dari :

- 1) Subbagian Tata Persuratan dan Arsip;
- 2) Subbagian Tata Usaha Biro; dan
- 3) Subbagian Keuangan.

b) Bagian Pelayanan, terdiri dari :

- 1) Subbagian Rumah Tangga dan Sarana Prasarana;
- 2) Subbagian Kendaraan; dan

c) Bagian Protokol, terdiri dari:

- 1) Subbagian Upacara;
- 2) Subbagian Tamu; dan

3) Subbagian Tata Usaha Pimpinan.

d) Bagian Hubungan Masyarakat

1) Subbagian Publikasi, Media Massa dan Dokumentasi;  
dan

2) Subbagian Penyiapan Informasi Kebijakan Pemerintah  
Daerah

e) Kelompok Jabatan Fungsional

**e. Struktur Organisasi**

Susunan organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :

a. Biro Tata Pemerintahan

b. Biro Hukum

c. Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan  
Kemasyarakatan

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :

a. Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

b. Biro Administrasi Pembangunan

3. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :

a. Biro Organisasi

b. Biro Umum, Humas dan Protokol

**f. Biro Umum, Humas dan Protokol**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta paragraf 2 pasal 15 menyatakan bahwa Biro Umum, Humas dan Protokol mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan mengkoordinasi pengelolaan administrasi perkantoran, tata usaha pimpinan, rumah tangga, kendaraan, sandi dan telekomunikasi, keprotokolan dan kehumasan.

**g. Fungsi Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai fungsi :

1. Penyusunan Program Kerja
2. penyiapan bahan kebijakan di bidang administrasi perkantoran, tata usaha pimpinan, rumah tangga, kendaraan, kehumasan serta keprotokolan;
3. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang administrasi perkantoran;
4. penyiapan bahan koordinasi di bidang administrasi perkantoran, tata usaha pimpinan, rumah tangga, kendaraan, kehumasan serta keprotokolan;
5. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang administrasi perkantoran;
6. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang administrasi perkantoran;
7. penyelenggaraan pelayanan keprotokolan dan tamu Pemerintah Daerah, penyelenggaraan pelayanan kehumasan Pemerintah Daerah;
8. penyelenggaraan rumah tangga Sekretariat Daerah;
9. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan pimpinan Pemerintah Daerah;
10. penyelenggaraan kearsipan Sekretariat Daerah;
11. pelaksanaan pelayanan kendaraan;
12. fasilitasi pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur;
13. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi perkantoran, tata usaha pimpinan, rumah tangga, kendaraan, hubungan masyarakat serta keprotokolan;
14. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang administrasi perkantoran;
15. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Biro;
16. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; dan

17. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsi dan tugasnya

**h. Visi dan Misi Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY**

Visi Biro UHP Setda DIY

Berdasarkan fungsinya, maka Biro UHP mempunyai visi “Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelayanan pimpinan secara optimal”.

Misi Biro UHP Setda DIY

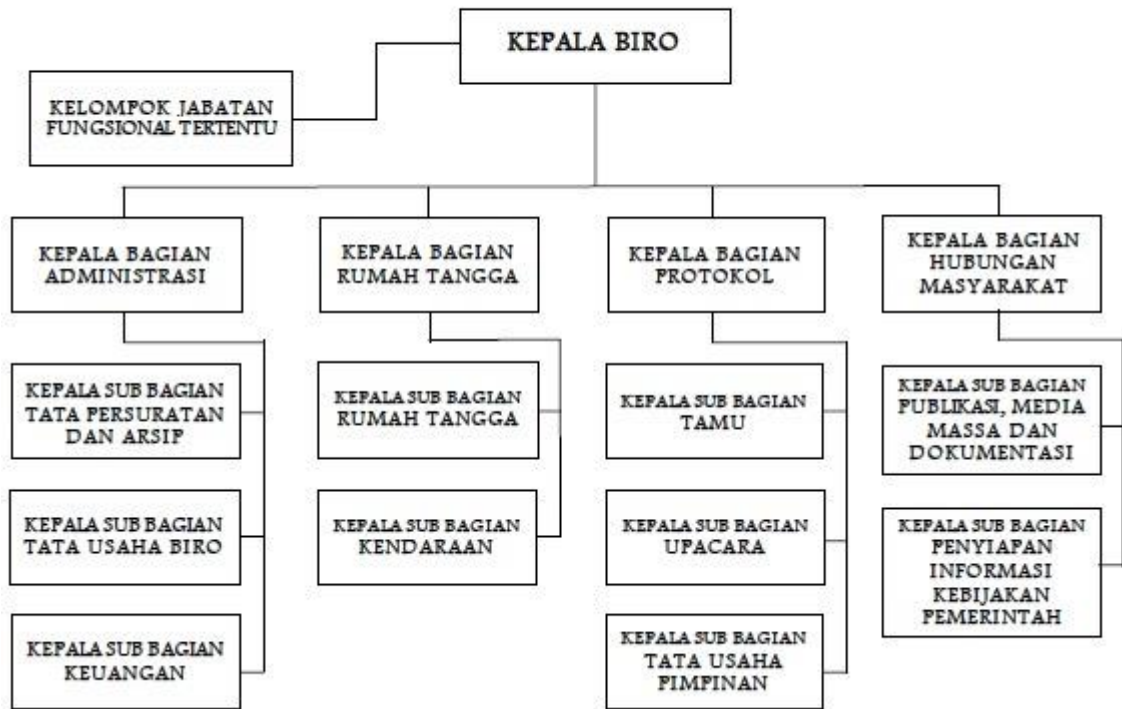
1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan penerapan Pemerintah untuk mewujudkan organisasi yang efektif dan efisien.
2. Mewujudkan pelayanan yang berkualitas
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi perkantoran dan kearsipan
4. Meningkatkan kualitas pelayanan rumah tangga Sekertariat, sandi dan telekomunikasi serta pelayanan kendaraan.
5. Meningkatkan profesionalisme pelayanan keprotokolan dan kehumasan.

**i. Struktur Organisasi Biro Umum, Humas dan Protokol**

Struktur Organisasi Biro Umum, Humas dan Protokol (Peraturan Gubernur DIY Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekertariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.



**STRUKTUR ORGANISASI BIRO UMUM, HUMAS DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



Gambar 3.2 Struktur Organisasi Pemda DIY

Sumber: Pemda DIY

**C. BAGIAN BIRO UMUM, HUMAS DAN PROTOKOL SETDA DIY**

Humas Pemda DIY berada dalam suatu Biro yang bernama Biro Umum, Humas dan Protokol (UHP). Sebelum bergabung dengan Biro Umum dan protokol pada tahun 2019, Humas Pemda DIY sebelumnya merupakan bidang dibawah naungan Diskominfo DIY. Tugas Humas Pemda DIY berkaitan dengan kegiatan *public realitions* serta publikasi dan dokumentasi kegiatan apapun yang dilakukan oleh Pemda DIY, terutama yang melibatkan pejabat Pemda DIY seperti meliput kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Kegiatan yang dilakukan Humas Pemda DIY yang berkaitan dengan *Public Realitions* yaitu seperti memberikan informasi kepada masyarakat, melakukan komunikasi dengan publik, menjalankan *media realitions*, menulis berita (*Press Release*), dan lain-lain. Dalam rangka untuk mencapai tujuan, tentunya banyak peranan

yang dilakukan oleh Humas Pemda DIY guna menampung aspirasi masyarakat serta transparasi informasi kepada masyarakat dan juga pegawai lainnya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 1 Tahun 2018 tugas dan fungsi masing-masing bagian di Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY adalah sebagai berikut :

1. Bagian Administrasi

Bagian Administrasi mempunyai tugas mengelola keuangan, kearsipan dan ketatausahaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Bagian Administrasi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja
- b. Penyiapan bahan administrasi
- c. Pengelolaan administrasi perkantoran
- d. Pengelolaan keuangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Sekretariat Daerah
- e. Pengkoordinasian kegiatan pelayanan kearsipan Sekretariat Daerah
- f. Pelaksanaan ketatausahaan biro
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Bagian Administrasi dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan dengan tugas dan fungsinya

2. Bagian Rumah Tangga

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas menyiapkan kebutuhan dibidang rumah tangga dan pelayanan kendaraan dinas

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Bagian Pelayanan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan rumah tangga
- c. Pelayanan pemeliharaan dan perawatan kantor gubernur, wakil gubernur, sekretaris daerah serta pelayanan perawatan perlengkapan rumah jabatan, kantor gubernur dan wakil gubernur

- d. Pelayanan pemakaian kendaraan dinas untuk pimpinan dan tamu
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Bagian Rumah Tangga dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

### 3. Bagian Protokol

Bagian Protokol mempunyai tugas menyelenggarakan keprotokolan Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Bagian Protokol mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja
- b. Penyiapan bahan keprotokolan
- c. Koordinasi penyelenggaraan keprotokolan kunjungan tamu
- d. Koordinasi penyelenggaraan keprotokolan upacara bendera, upacara bukan upacara bendera dan acara resmi
- e. Koordinasi penyelenggaraan keprotokolan kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekertaris Daerah
- f. Pelaksanaan keprotokolan kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekertaris Daerah.
- g. Penyelenggaraan ketatausahaan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekertaris Daerah, Staf Ahli Gubernur dan Asisten
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bagian Protokol dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

### 4. Bagian Hubungan Masyarakat

Bagian Humas mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi kehumasan, yaitu :

- a. Penyusunan program kerja
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan hubungan masyarakat

- c. Koordinasi penyelenggaraan pelayanan kehumasan serta hubungan dengan lembaga kehumasan yang lain
- d. Penyelenggaraan publikasi, pendokumentasian kebijakan dan kegiatan Pemerintah Daerah
- e. Penyiapan kebijakan pemanfaatan media luar ruang
- f. Pelaksanaan kehumasan Pemerintah Daerah
- g. Penyusunan perumusan kebijakan teknis dibidang pemberitaan dan kehumasan Pemerintah Daerah
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Bagian Hubungan Masyarakat dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pada pasal 168, Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari :

- 1) Subbagian Publikasi, Dokumentasi Media Massa (PDM)
- 2) Subbagian Penyiapan Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah (PIK)

Humas sebagai informasi pemerintah dituntut untuk selalu dapat melakukan tugasnya dengan baik demi terciptanya komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat. Adapun berbagai aktivitas serta media yang digunakan dalam pencapaian mutu pelayanan informasi kepada publik diantaranya:

- 1. Melaksanakan liputan kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekertaris Daerah, Pejabat dan Tamu Negara
- 2. Kehumasan meliputi rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Sekertaris Daerah, Pejabat dan Tamu Negara dan kemudian informasi dipublikasikan kepada masyarakat melalui media sosial
- 3. Menjalin hubungan yang baik dengan Pers dan Wartawan
- 4. Humas memiliki beberapa cara untuk menjalin hubungan yang baik dengan Pers dan Wartawan sebagai rekan sekaligus pihak yang terkait langsung dengan penyebaran informasi dan berita Pemda DIY kepada publik, yaitu melalui kegiatan :

1. Keterangan Pers (*Press Statment*)
  2. Wawancara Pers (*Press Interview*)
  3. Gathering
5. Pemanfaatan Media Massa untuk peningkatan layanan informasi kepada publik

Munculnya Media Massa menjadi salah satu andalan bagi Humas Pemda DIY dalam menyebarluaskan berita kepada publik. Perkembangan teknologi media memudahkan Humas dalam menyebarluaskan informasi kepada publik dengan tempo waktu yang singkat. Media massa dibagi menjadi dua yaitu, media cetak dan media elektronik.

**BAB IV**  
**PEMBAHASAN**

A. Kegiatan PKL

Dalam pembahasan kali ini penulis akan membahas kegiatan yang dilakukan di Biro Umum Humas dan Protokol Sekretariat Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di bagian Humas selama menjalani Praktek Kerja Lapangan (PKL) selama 3 bulan terhitung dari tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan 24 April 2019. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

NO.	TANGGAL	JAM		KEGIATAN
		MASUK	KELUAR	
1.	11 Februari 2019	07.30	16.00	1. Sosialisasi dan adaptasi lingkungan kerja 2. Orientasi Liputan Panitia SO 1 Maret bertemu dengan Wakil Gubernur 3. Monitor Agenda di Kantor Protokol
2.	12 Februari 2019	07.30	16.00	1. Monitor Agenda di Kantor Protokol 2. Liputan Menerima Panitia FKY 2019 bertemu dengan Wakil Gubernur 3. Monitor Agenda di Kantor Protokol
3.	13 Februari 2019	07.30	16.00	1. Monitor Agenda di Kantor Protokol
4.	14 Februari 2019	07.30	16.00	1. Monitor Agenda di Kantor Protokol 2. Liputan Panitia Peluncuran Buku Paku Alam V bertemu dengan Wakil Gubernur 3. Monitor Agenda di Kantor Protokol
5.	15 Februari 2019	07.30	14.30	1. Monitor Agenda di Kantor Protokol 2. Liputan Dubes German bertemu dengan Gubernur 3. Monitor Agenda di Kantor Protokol

6.	18 Februari 2019	07.30	16.00	1. Monitor Agenda di Kantor Protokol
7.	19 Februari 2019	07.30	16.00	1. Monitor Agenda di Kantor Protokol 2. Liputan Menerima Panitia Forum Persatuan Umat Beriman bertemu dengan Wagub 3. Monitor Agenda di Kantor Protokol
8	20 Februari 2019	07.30	16.00	1. Monitor Agenda di Kantor Protokol 2. Liputan Acara KPK/ Kunjungan Bupati Kulonprogo 3. Monitor Agenda di Kantor Protokol
9.	21 Fbruari 2019	07.30	16.00	1. Monitor Agenda di Kantor Protokol
10.	22 Februari 2019	07.30	14.30	1. Monitor Agenda di Kantor Protokol 2. Liputan Menerima Tamu Inspektorat & BAPEDA/ Dinas Pengelola Aset Se-DIY 3. Monitor Agenda di Kantor Protokol
11.	25 Februari 2019	07.30	16.00	1. Monitor Agenda di Kantor Protokol 2. Liputan Panitia HUT RS DR Sardjito bertemu dengan Wakil Gubernur 3. Monitor Agenda di Kantor Protokol
12.	26 Februari 2019	07.30	16.00	1. Monitor Agenda di Kantor Protokol
13.	27 Februari 2019	07.30	16.00	1. Monitor Agenda di Kantor Protokol
14.	28 Februari 2019	07.30	16.00	1. Monitor Agenda di Kantor Protokol
15.	01 Maret 2019	07.30	14.30	1. Monitor Agenda di Kantor Protokol 2. Liputan Menerima Panitia World Kidney Day 2019 bertemu dengan Wakil Gubernur 3. Monitor Agenda di Kantor Protokol

16.	04 Maret 2019	07.30	16.00	1. Monitor Agenda di Kantor Protokol 2. Liputan Kunjungan Kerja DPRD Jawa Barat 3. Monitor Agenda di Kantor Protokol
17.	05 Maret 2019	07.30	16.00	1. Monitor Agenda di Kantor Protokol
18.	06 Maret 2019	07.30	16.00	1. Monitor Agenda di Kantor Protokol
19.	07 Maret 2019	07.30	16.00	1. Monitor Agenda di Kantor Protokol
20.	08 Maret 2019	07.30	14.30	1. Monitor Agenda di Kantor Protokol
21.	11 Maret 2019	07.30	16.00	1. Monitor Agenda di Kantor Protokol 2. Liputan Kunjungan Kerja Bapem Perda DPRD Jateng 3. Monitor Agenda di Kantor Protokol
22.	12 Maret 2019	07.30	16.00	1. Monitor Agenda di Kantor Protokol 2. Monitor Agenda di Kantor Protokol
23.	13 Maret 2019	07.30	16.00	1. Monitor Agenda di Kantor Protokol
24.	14 Maret 2019	07.30	16.00	1. Monitor Agenda di Kantor Protokol 2. Liputan Kunjungan Ikatan Ahli Pengaduan Indonesia bersama Wagub 3. Monitor Agenda di Kantor Protokol
25.	15 Maret 2019	07.30	14.30	1. Monitor Agenda di Kantor Protokol 2. Liputan Kunjungan dari Musyawarah Nasional Persatuan Mahasiswa dan Alumni Dikti bersama Wagub 3. Monitor Agenda di Kantor Protokol
26.	18 Maret 2019	07.30	16.00	1. Monitor Agenda di Kantor Protokol
27.	19 Maret 2019	07.30	16.00	1. Monitor Agenda di Kantor Protokol 2. Liputan Kunjungan Kerja Jawa Timur



				3. Monitor Agenda di Kantor Protokol
28.	20 Marret 2019	07.30	16.00	1. Monitor Agenda di Kantor Protokol
29.	21 Maret 2019	07.30	16.00	1. Monitor Agenda di Kantor Protokol
30.	22 Maret 2019	07.30	14.30	1. Monitor Agenda di Kantor Protokol 2. Liputan Pembentukan Komite Pelatihan Vokasi Daerah (KPVD) untuk peningkatan Komptensi SDM. Disnakertrans
31.	25 Maret 2019	07.30	16.00	1. Monitor Agenda di Kantor Protokol
32.	26 Maret 2019	07.30	16.00	1. Monitor Agenda di Kantor Protokol 2. Liputan Kunjungan dari Badan Pengawasan Keuangan bertemu dengan Gubernur DIY 3. Monitor Agenda di Kantor Protokol
33.	27 Maret 2019	07.30	16.00	1. Monitor Agenda di Kantor Protokol
34.	28 Maret 2019	07.30	16.00	4. Monitor Agenda di Kantor Protokol 5. Liputan Rapat Koordinasi & Sosialisasi Regulasi Bina Integritas bersama Sekertaris Daerah. Hotel Tentrem 6. Monitor Agenda di Kantor Protokol
35.	29 Maret 2019	07.30	14.30	10. Monitor Agenda di Kantor Protokol 2. Liputan Kunjungan Badan Pengawas Keuangan & Dewan Perwakilan Daerah DIY bersama Wagub
36.	1 April 2019	07.30	16.00	1. Monitor Agenda di Kantor Protokol
37.	2 April 2019	07.30	16.00	1. Monitor Agenda di Kantor Protokol 2. Liputan Pelaksanaan Rekrstrukturisasi Usaha Bagi Koperasi dan UKM Binaan PLUT. Dinas UMKM & Koperas

				3. Monitor Agenda di Kantor Protokol
38.	4 April 2019	07.30	16.00	1. Monitor Agenda di Kantor Protokol 2. Liputan Penyerahan SK CPNS Formasi 2018 oleh Sekda 3. Monitor Agenda di Kantor Protokol
39.	5 April 2019	07.30	14.30	1. Monitor Agenda di Kantor Protokol
40.	8 April 2019	07.30	16.00	1. Monitor Agenda di Kantor Protokol
41.	9 April 2019	07.30	16.00	1. Monitor Agenda di Kantor Protokol 2. Liputan Kunjungan Pemerintah Kota Ambon 3. Monitor Agenda di Kantor Protokol
42.	10 April 2019	07.30	16.00	1. Monitor Agenda di Kantor Protokol
43.	11 April 2019	07.30	16.00	1. Monitor Agenda di Kantor Protokol
44.	12 April 2019	07.30	14.30	1. Monitor Agenda di Kantor Protokol
45.	15 April 2019	07.30	16.00	1. Monitor Agenda di Kantor Protokol 2. Distribusi Bulletin Jogjawara Kabupaten Kota Madya
46.	16 April 2019	07.30	16.00	1. Monitor Agenda di Kantor Protokol
47.	18 April 2019	07.30	16.00	1. Monitor Agenda di Kantor Protokol 2. Liputan Video Conference oleh Sekertaris Daerah DIY 3. Monitor Agenda di Kantor Protokol
48.	22 April 2019	07.00	16.00	1. Liputan TPID ke Pasar Niten 2. Monitor Agenda di Kantor Protokol
49.	23 April 2019	07.30	16.00	1. Monitor Agenda di Kantor Protokol 2. Liputan Jumpa Pers TPID
50.	24 April 2019	07.30	16.00	1. Monitor Agenda di Kantor Protokol 2. Liputan Isra' Miraj 3. Monitor Agenda di Kantor

				Protokol
51.	25 April 2019	07.30	16.00	1. Monitor Agenda di Kantor Protokol 2. Liputan Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi dari KPK 3. Monitor Agenda di Kantor Protokol
52.	26 April 2019	07.30	14.30	1. Monitor Agenda di Kantor Protokol
53.	29 April 2019	07.30	16.00	1. Monitor Agenda di Kantor Protokol
54.	30 April 2019	07.30	16.00	1. Monitor Agenda di Kantor Protokol

Tabel 4.1 Kegiatan PKL

## B. Deskripsi Tugas

Tugas harian yang dilakukan oleh penulis selama melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Biro Umum Humas dan Protokol Sekretariat Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terbagi menjadi dua tugas, yaitu tugas umum dan tugas khusus. Tugas umum merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penulis pada saat PKL, sedangkan tugas khusus adalah kegiatan yang berhubungan dengan laporan PKL, yaitu melakukan liputan disetiap kegiatan Pemda DIY, pengambilan video sebagai dokumentasi kegiatan, pengambilan gambar sebagai dokumentasi kegiatan, melakukan wawancara kepada narasumber pada sebuah kegiatan yang nantinya akan digunakan untuk membuat release/ berita. Adapun bentuk tugas PKL yaitu sebagai berikut:

### 1. Tugas Umum

#### a. Monitoring Agenda Kegiatan

Kegiatan penulis di setiap paginya adalah monitoring agenda yang berada di ruang bagian Protokol. Kemudian mencatat atau mengambil gambar agenda yang ada di papan ruang protokol, yang selanjutnya akan di tulis di papan agenda ruang humas. Monitoring juga dilakukan secara online dengan mengecek agenda di komputer dengan *sign in* pada akun humas agar bisa melihat agenda pada hari tersebut.

Setelah melihat dan mencatat agenda yang ada, kemudian akan di bagi tugas oleh Kepala Subbagian (Kasubag) Humas. Dalam setiap kegiatan terdapat 3 orang untuk mengikuti kegiatan tersebut, yaitu reportase, fotografer, dan videografer. Pembagian tugas tersebut dipilih oleh Kasubag sesuai dengan keahliannya. Monitoring di lakukan pada pagi hari setiap masuk kerja dan juga pada sore hari sebelum jam kerja berakhir.

b. Distribusi Buletin Jogjawara Humas Pemda DIY

Jogjawara merupakan nama dari produksi buletin humas Pemda DIY, dengan tagline *Media Komunikasi & Transformasi Birokrasi* merupakan buletin siaran Pemerintah Daerah DIY yang rutin di terbitkan satu bulan sekali. Isi dari buletin ini pun beragam, mulai dari kegiatan Gubernur DIY dan Wakil Gubernur DIY, kegiatan Pemda DIY, hingga rubik testimoni.

Tidak hanya distribusi di provinsi saja, Buletin Jogjawara yang disusun oleh humas Pemda DIY juga didistribusikan ke seluruh kabupaten maupun kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penulis bertugas untuk mendistribusikan di lingkungan Pemda DIY dan Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Penulis beserta salah satu staff humas mengantar langsung ke seluruh Instansi, Biro dan Dinas Pemerintah yang ada di sekitar Pemda DIY.

2. Tugas Khusus

a. Reporter/ Penulis Release

Saat melaksanakan PKL, penulis beberapa kali mendapatkan tugas sebagai reporter ataupun penulis release. Pemda DIY memiliki kegiatan yang terjadwal setiap harinya yang dapat di cek protokoler dan juga website *online* jadwal pejabat Pemda DIY. Layaknya jurnalis pada umumnya, staff humas memiliki kegiatan yang berupa meliputi kegiatan-kegiatan yang ada di Pemda DIY, terutama yang melibatkan Gubernur DIY, Wakil Gubernur DIY, Sekertaris Daerah DIY, ataupun pejabat Pemda lainnya.

Tahapan seorang reporter disini adalah, mengikuti jalannya kegiatan, menulis, dan merekam sambutan dari pejabat yang hadir dan narasumber, jika dirasa data atau informasi kurang, reporter harus melakukan wawancara dengan pihak yang terkait dalam kegiatan tersebut, oleh pejabat atau pun tamu pejabat yang ikut hadir dalam kegiatan tersebut.

Tahapan selanjutnya yaitu, menulis berita dengan panduan 5W+1H, setelah berita selesai dibuat, penulis harus langsung memasukan berita tersebut ke draft website humas Pemda DIY yang selanjutnya akan di edit oleh editor humas sebelum berita tersebut dipublikasikan di website.

b. Fotografer

Tak hanya sebagai penulis release/ berita pada kegiatan PKL penulis juga sesekali ditugaskan menjadi fotografer di beberapa kegiatan Pemda DIY, seperti kegiatan kunjungan kerja Pemda DIY, Pemantauan harga bahan pokok di 5 Kabupaten di DIY, Pengajian Aparat Sipil Negara (ASN).

Foto digunakan untuk data pendukung release/ berita kegiatan Pemda DIY yang akan diunggah di website [jogjaprovo.go.id](http://jogjaprovo.go.id). Sebelum diunggah di website foto juga diedit terlebih dahulu oleh bagian editor agar hasil foto maksimal dan kemudian diberi hak cipta agar gambar dapat dipertanggung jawabkan.

c. Videografer

Selain foto, dokumentasi kegiatan maupun event juga dilakukan dalam bentuk video. Video yang diambil harus mampu menjelaskan secara keseluruhan mengenai kegiatan yang dilaksanakan mulai dari menginformasikan kegiatan apa yang sedang dilaksanakan sampai mengenai informasi siapa saja yang hadir dalam kegiatan tersebut. Hasil video beberapa akan diedit dan diunggah di akun *youtube* humas Pemda DIY. Pada tugas ini, penulis hanya sampai pada tahap pengambilan video, untuk

proses pengeditan dilakukan oleh staff humas Pemda DIY. Selain untuk konten youtube, setiap video merupakan arsip atau data kegiatan humas DIY, serta menjadikan bahan video/ berita di relasi humas yaitu di Jogja Istimewa TV.

d. Jumpa Pers dengan Media

Salah satu agenda humas Pemda DIY adalah jumpa pers. Pada saat penulis menjalani PKL di humas Pemda DIY, diadakan jumpa pers mengenai pencegahan potensi konflik sosial dan jumpa pers mengenai harga dan stok pangan menjelang lebaran. Pada saat jumpa pers penulis berinteraksi dengan berbagai wartawan dan juga bertugas sebagai reporter untuk pembuatan release yang akan diunggah di website jogjaprovo.go.id.

Humas Pemda DIY memiliki fasilitas ruangan untuk para wartawan membuat berita atau sekedar ikut meliput kegiatan yang ada di Pemda DIY, yaitu ruang media center, disinilah tempat berkumpul wartawan dari berbagai media yang ada di Yogyakarta.

Dalam rangka menunjang tugas dan fungsi yang dijalankan, adapun kegiatan yang dijalankan oleh humas Pemda DIY selama penulis menjalankan PKL adalah sebagai berikut:

**a. Kemampuan membangun dan membina saling pengertian antara kebijaksanaan pimpinan lembaga/instansi dengan khalayak internal dan eksternal**

Dalam suatu organisasi, membangun hubungan baik dengan publik internal maupun eksternal menjadi sangat penting, sebab tujuan suatu instansi tidak akan tercapai ketika tidak ada jalinan kerja sama antara humas dengan publik internal maupun eksternal. Dengan tidak adanya kerja sama atau saling membina pengertian, bisa terjadi kesalahpahaman atau hubungan yang tidak baik antara organisasi dengan publiknya. Humas Pemda DIY selalu berusaha membangun dan membina saling pengertian antara kedua belah pihak,

contohnya dengan wartawan atau media, ketika media membutuhkan informasi terkait kegiatan Pemda DIY maka humas akan memberikan informasi tersebut, begitu pula sebaliknya.

**b. Sebagai pusat pelayanan dan pemberian informasi, baik bersumber dari instansi/lembaga maupun berasal dari pihak publiknya**

Humas Pemda DIY memiliki website resmi yaitu jogjaprovo.go.id serta media sosial seperti twitter, instagram, fanpage facebook dan juga youtube. Media-media tersebut menjadi wadah atau sarana Humas Pemda DIY dalam memberikan atau menyampaikan informasi kepada publik. Bentuk informasi yang diberikan berupa press release, foto, dan juga video. Tak hanya publik, awak media pun memerlukan informasi-informasi yang berasal dari Humas Pemda DIY, maka dari itu, Humas Pemda DIY dituntut secara cepat untuk mempublikasikan setiap kegiatan yang ada di Pemda DIY ataupun event di DIY. Humas Pemda DIY melalui Kasi PDM Humas juga memberikan informasi tentang jadwal kegiatan Pemda DIY kepada awak media unit Kepatihan untuk dapat meliput kegiatan-kegiatan tersebut. Dengan begitu, fungsi Humas Pemda DIY sebagai pusat pelayanan dan pemberian informasi dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini humas Pemda DIY berarti melakukan tugas sebagai penyebar informasi.

**c. Melakukan dokumentasi setiap kali ada suatu kegiatan atau acara penting di lingkungan instansi/lembaga**

Pendokumentasian suatu kegiatan merupakan tugas utama yang dilakukan oleh Humas Pemda DIY bagian PDM (Publikasi, Dokumentasi, dan Media massa). Setiap ada kegiatan ataupun event yang ada di DIY, terutama yang melibatkan pejabat Pemerintah Daerah DIY baik itu kegiatan

Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, ataupun pejabat Pemda DIY lainnya, maka tugas Humas Pemda DIY adalah melakukan pendokumentasian dan tidak lupa juga untuk mempublikasikannya pada media-media yang dimiliki Humas Pemda DIY. Dokumentasi kegiatan yang dilakukan oleh Humas Pemda DIY yaitu dalam bentuk foto, video dan juga berita/press release dari kegiatan yang diliput. Pendokumentasian tersebut selain digunakan sebagai untuk publikasi di setiap jejaring media sosial dan website Pemda DIY, juga digunakan sebagai arsip kegiatan. Selain itu, data-data yang telah didokumentasikan oleh Humas Pemda DIY juga berguna untuk tayangan Jogja Istimewa TV, karena tim dari Jogja Istimewa TV mengambil data atau bahan siaran dari Humas Pemda DIY, yang berupa video

**d. Mencari berbagai data dan informasi yang berasal dari berbagai sumber, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan lembaga/instansi atau mengenai pembentukan opini publiknya**

Pengumpulan berbagai data dan informasi yang berasal dari berbagai sumber dilakukan oleh Humas Pemda DIY, data yang dikumpulkan biasanya berupa data untuk menunjang isi berita/press release yang dibuat. Tak hanya itu, pengumpulan informasi mengenai kegiatan Pemda DIY juga dilakukan oleh Humas Pemda DIY untuk disebarkan kepada awak media unit Kepatihan, agar para awak media juga selalu up to date dengan kegiatan Pemda DIY dan dapat meliputnya, awak media dapat mengetahui agenda kegiatan melalui papan tulis kegiatan yang ada di Humas ataupun bisa di share melalui grup WA. Dengan begitu, penyebaran informasi mengenai Pemda DIY juga akan terbantu dengan adanya awak media.



**e. Mampu membuat produk untuk mempublikasikan kegiatan kehumasan, misalnya melalui klipng, press release, news letter, majalah PR internal, bulletin, brosur, poster dan lain sebagainya**

Untuk mempublikasikan kegiatan, Humas Pemda DIY memiliki produk atau media dalam penyampaian informasi, mulai dari foto, video, dan juga buletin Jogjawara. Foto yang diproduksi oleh Humas Pemda DIY menjadi pelengkap setiap release yang dipublish di website jogjaprovo.go.id. Dengan foto, akan lebih jelas menggambarkan bagaimana suatu kegiatan berjalan, selain itu, foto juga akan menjadi bukti bahwa kegiatan tersebut benar-benar dilaksanakan. Dalam pengambilan foto juga tidak sembarangan, foto yang di dapatkan harus dapat menjelaskan kegiatan apa, siapa saja yang hadir dan juga bagaimana kegiatan itu berjalan. Penulis pun beberapa kali mendapatkan tugas menjadi fotografer dalam kegiatan Pemda DIY, seperti pada saat Sarasehan Kebangsaan, Kunjungan Kerja, Studi Banding dan lain sebagainya.

Selain foto, Humas Pemda DIY juga memproduksi Video. Setelah peliputan kegiatan selesai, nantinya beberapa file video yang merupakan acara besar atau acara penting akan diedit terlebih dahulu dan dijadikan menjadi 1 video utuh, baru kemudian di upload ke youtube. Untuk video seperti kunjungan kerja dan studi banding, biasanya hanya untuk arsip saja, yang akan di olah lebih lanjut biasanya adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Selain itu, video ini juga bisa bermanfaat untuk Jogja Istimewa TV untuk siaran ataupun tayangan di stasiun televisi tersebut.

Selain yang disebutkan di atas, Humas Pemda DIY juga memiliki buletin yang bernama Jogjawara, bulletin ini diproduksi rutin 1 bulan sekali. Rubrik pada buletin tersebut beragam, mulai dari foto, rubrik informasi, feature, rubrik

testimoni, kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan sebagainya. Produksi buletin ini juga dapat menjadi wadah untuk transparansi kegiatan dan menumbuhkan sikap percaya antara internal Pemda DIY.

### C. Pembahasan

Salah satu tugas praktisi humas dalam lembaga pemerintahan adalah memberikan layanan informasi kepada publik yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah. Selain itu praktisi humas juga bertindak sebagai komunikator antara pemerintah kepada publik, perlunya transparansi atau keterbukaan antara pemerintah dengan masyarakat membuat humas memiliki peran penting dalam menjembatani proses penyampaian informasi tersebut. Maka penting bagi humas Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk mampu menyebarkan informasi secara efektif dan cepat dengan sistem informasi yang baik melalui media elektronik atau media sosial.

Humas Pemerintah Daerah DIY memiliki media untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat atau instansi/ organisasi terkait kegiatan-kegiatan atau program, serta hal lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah DIY. Keberadaan media elektronik dan media sosial sangat berpengaruh kepada pemerintahan untuk meningkatkan *awarness* atau kepercayaan antara publik kepada pemerintah, juga sebagai upaya membangun citra Pemerintah Daerah DIY.

Secara struktural humas Pemda DIY berada di bawah Biro Umum Humas dan Protokol pada bagian Publikasi Media Massa (PDM) yang memiliki peran untuk membuat berita dari setiap kegiatan yang dilakukan di Pemda DIY yang nantinya akan diunggah ke website Pemda DIY. Hal ini dilakukan sebagai upaya pelayanan kepada publik agar masyarakat lebih mudah mengetahui aktivitas apa saja yang dilakukan oleh Pemda DIY serta keterbukaan informasi Pemda DIY kepada masyarakat.

Humas Pemda DIY berfungsi sebagai perantara atau jembatan untuk penyampaian informasi kepada publik, seperti contohnya menyampaikan kepada masyarakat terkait dengan kegiatan yang dilakukan

oleh Pemda DIY ataupun program-program yang sedang dijalankan oleh Pemda DIY. Dalam hal ini humas diharapkan dapat menjadi alat atau sarana dalam penyebaran informasi/ publikasi mengenai pemerintah, yakni juga dengan melalui kerja sama dengan pers, media cetak, elektronik, *online*, ataupun media lainnya.

Humas Pemda DIY menjalin relasi dengan media serta berkaitan juga dengan publikasi dan dokumentasi. Humas Pemda DIY khususnya pada bagian Publikasi, Dokumentasi dan Media Massa (PDM) melakukan kegiatan seperti konferensi pers, membuat *press release*, menerbitkan media internal (dalam hal ini Pemda DIY memiliki bulletin Jogjakawara), mendokumentasi semua kegiatan instansi serta mempublikasikannya kepada publik.

Humas Pemda DIY melakukan penyebarluasan informasi kepada publik melalui media elektronik seperti website. Website Pemda DIY [jogjaprov.go.id](http://jogjaprov.go.id) merupakan wadah untuk menyampaikan, segala informasi terkait kegiatan yang dilakukan oleh Pemda DIY, termasuk informasi mengenai Kota Yogyakarta diunggah di website. Masyarakat dipermudah untuk mengakses informasi dan diberi ruang bagi masyarakat untuk mengeluarkan apirasinya melalui kolom komentar yang ada di website Pemda DIY. Humas Pemda DIY menggunakan website sebagai sarana informasi dari Pemerintah Yogyakarta kepada publik karena dengan menggunakan website diharapkan dapat meningkatkan *efisiensi*, *efektivitas*, *transparansi* serta *akuntabilitas* penyelenggaraan pemerintahan di DIY. Serta tampilan yang menarik dari konten website membuat masyarakat jadi beralih menggunakan media elektronik website dibanding media cetak. Namun humas tidak hanya fokus pada media elektronik tetapi juga tetap memuat berita yang ada dengan mencetak bulletin dalam setiap bulannya, yang nantinya akan diberikan ke kantor pemerintahan yang ada di lingkungan Pemda DIY dan seluruh kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Diera digitalisasi seperti saat ini humas Pemda DIY tidak hanya membuat berita saja tetapi ditarget mampu mendapat 30.000 viewer dalam

waktu per 3 bulan. Ini juga sebagai tantangan bagi humas Pemda DIY untuk selalu aktif dalam penyebarluasan informasi di media elektronik juga media sosial. Tidak hanya menggunakan media elektronik website tetapi humas Pemda DIY juga menggunakan media sosial sebagai perantara untuk menarik masyarakat agar mengunjungi laman di website Pemda DIY. Isi berita yang ada di media sosial juga mengutip dari berita yang ada di website [jogjaprov.go.id](http://jogjaprov.go.id), segala informasi yang ada di media sosial humas Pemda DIY nantinya juga akan bermuara ke website.

Humas Pemda DIY memiliki media sosial seperti facebook, twitter, instagram dimana media tersebut digunakan sebagai sarana untuk menampung aspirasi dari publik. Media sosial tersebut tidak hanya menjalankan komunikasi satu arah, tetapi juga komunikasi dua arah, hal tersebut dapat terlihat dari kolom komentar yang ada dimasing-masing platform media sosial. Ketika ada masyarakat yang bertanya seputar Pemda DIY atau kegiatan yang dilakukan oleh Pemda DIY, maka masing-masing admin media sosial akan menjawabnya. Dari hal tersebut, maka menunjukkan bahwa humas Pemda DIY juga menekankan peningkatan pelayanan umum. Informasi yang diberikan bukan hanya diperuntukkan kepada masyarakat DIY saja, melainkan juga dapat diakses oleh masyarakat luar DIY maupun mancanegara, sebab akun media sosial ataupun website Pemda DIY bisa diakses oleh siapa saja.

Saat melakukan PKL di Humas Pemda DIY, mahasiswa magang seperti penulis tidak dibeda-bedakan dengan senior-senior lain yang ada di humas Pemda DIY ketika diberikan penugasan. Penulis dituntut sama dengan staff humas lainnya, yaitu mampu ditugaskan sendiri tidak bergantung dengan senior humas lainnya. Dalam setiap liputan suatu kegiatan aka nada 3 petugas, akan tetapi mengemban tugas masing-masing seperti sebagai fotografer, videografer dan juga sebagai reporter. Dalam penugasan tersebut tentu saja memiliki tanggung jawab masing-masing atas tugas yang diberikan, sehingga tidak bisa bergantung satu dengan yang lainnya. Ketika penulis mendapatkan tugas sebagai reporter misalnya,

penulis harus berani menanyakan detail kegiatan kepada narasumber yang bersangkutan.

Liputan kegiatan yang dilakukan oleh penulis terbagi atas dua jenis yaitu kegiatan yang terbuka dan juga kegiatan tertutup atau khusus. Kegiatan terbuka yaitu kegiatan yang dapat diliput oleh humas Pemda DIY dan beritanya dapat dimuat di website seperti kegiatan event tahunan, kunjungan kerja Pemerintah, sosialisasi, segala kegiatan yang bersifat eksternal yang perlu masyarakat ketahui. Sedangkan kegiatan khusus adalah kegiatan yang bersifat internal, humas hanya dapat mendokumentasikan kegiatan tersebut untuk dokumentasi Pemda DIY dan tidak diizinkan untuk mempublikasikan ke website, seperti kunjungan perwakilan BPK, dan kunjungan calon presiden pada waktu itu. Hal tersebut tidak dapat dipublikasikan karena akan memunculkan banyak opini dari masyarakat kepada Pemda DIY. Dalam setiap liputan reporter harus selalu menanyakan mengenai bagaimana respon Gubernur DIY berkaitan dengan maksud dan tujuan dilakukannya kunjungan.

Pembuatan press release yang penulis lakukan tentunya yang berkaitan dengan kegiatan Pemda DIY meliputi kegiatan pejabat daerah maupun *event* yang ada di DIY. Press release yang dibuat oleh staf humas Pemda DIY menjadi sarana untuk penyampaian kegiatan organisasi/instansi kepada publik. Dalam pembuatan press release, penulis juga dilatih untuk terbiasa cepat dalam pembuatannya, kegiatan yang dilakukan di satu hari tersebut harus jadi berita atau releasenya dalam hari itu juga. Untuk teknik pembuatan press release, penulis dilatih untuk membuat press release yang sesuai dengan kaidah press release, yakni mengandung nilai berita, faktanya termasa/terkini, dan mengandung rumus 5W & 1H dan disusun dengan kata-kata yang umum agar mudah dipahami oleh publik. Tetapi, dalam penulisannya menggunakan teknik dari khusus-umum.

Dalam praktiknya, pembuatan press release harus memperhatikan ejaan dalam penulisan, sebab hal tersebut sangatlah penting agar dapat dipahami oleh masyarakat atau publik yang membacanya. Penulis dituntut

untuk teliti dalam setiap pembuatan press release, apabila terdapat kesalahan, akan berakibat fatal seperti terjadinya kesalahpahaman. Maka dari itu, sebelum di upload ke website, terlebih dahulu berita atau release yang dibuat melalui proses edit oleh editor terlebih dahulu agar terhindar dari kesalahan. Tak kalah penting juga, Humas Pemda DIY mengajarkan kepada penulis mengenai keakuratan nama pejabat. Sebelum berita dimuat, terlebih dahulu penulis mencari nama dan gelar dari pejabat atau narasumber yang ada di release melalui internet, agar tidak salah dalam penyebutan nama ataupun gelar.

Adapun tujuan dari publikasi kegiatan ataupun event yang ada di Pemda DIY melalui press release di media elektronik internet seperti website adalah:

1. Sebagai bentuk transparansi atau keterbukaan Pemerintah Daerah DIY kepada masyarakat.
2. Membangun rasa kepercayaan masyarakat DIY kepada Pemda DIY
3. Menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan DIY.
4. Sebagai sarana pelayanan informasi publik.

### **Peran humas Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam kegiatan *Press Release* untuk website [jogjaprov.go.id](http://jogjaprov.go.id)**

Selama melaksanakan PKL di bagian Publikasi Media Massa (PDM) di Pemda DIY penulis diberi kesempatan untuk membantu membuat press release yang bertujuan untuk memberi informasi tentang kegiatan-kegiatan, event, informasi yang ada di Pemda DIY untuk dipublikasikan kepada khalayak melalui media sosial yakni website [jogjaprov.go.id](http://jogjaprov.go.id). Penerbitan press release ini dilakukan oleh humas Pemda DIY melalui proses dari liputan kegiatan sampai dengan diunggah di website.

Agenda kegiatan diperoleh dari agenda yang sudah dibuat Subbagian Protokol, humas Pemda DIY hanya mengikuti agenda kegiatan Gubernur DIY, Wakil Gubernur DIY, Sekda DIY serta Pejabat Pemda DIY lainnya yang sudah terjadwalkan disetiap harinya. Agenda yang ada di ruang Protokol nantinya akan

ditulis di papan agenda ruangan humas, dan nantinya akan ada pembagaian tugas oleh Kasubag humas PDM, selain untuk informasi humas, agenda ini juga untuk menginformasikan kepada rekan wartawan dari beberapa media massa bisa langsung datang ke kantor humas, atau dari pihak humas menyebarkan informasi agenda ini melalui Group Whatsapp humas dengan media, yang harapannya kegiatan tersebut dapat dipublikasikan kepada masyarakat. Selanjutnya tahapan liputan, pengambilan gambar dan video untuk dokumentasi, dan untuk diunggah ke website. Pada tahapan terakhir akan dilakukan evaluasi oleh editor, yaitu editor akan mengedit berita yang sudah di simpan di portal jogjaprov admin oleh reporter dan dimuat di website. Pada saat berita sudah dimuat oleh editor, akan ada evaluasi dalam penulisan jika memang terjadi kesalahan dalam penulisan oleh reporter. Editor akan turun tangan untuk memberikan masukan kepada reporter tersebut untuk memberikan arahan agar tidak terjadi kesalahan lagi dalam penulisan.

Adapun langkah-langkah peliputan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan Riset
  1. Humas memonitoring jadwal kegiatan
  2. Pencatatan agenda, pembagian tugas oleh Kepala Substansi Bagian (Kasubag) humas
  3. Menghubungi media terkait dengan agenda
  4. Mencari materi terkait dengan kegiatan melalui internet atau arsip di website jogjaprov.go.id
  5. Membuat daftar pertanyaan
- b. Mengumpulkan Data
  1. Merekam jalannya kegiatan
  2. Mengambil gambar dan video sebagai dokumentasi
  3. Wawancara dengan narasumber
- c. Menuliskan Liputan/ Press Release
  1. Mengolah hasil liputan menjadi berita
  2. Menyimpan naskah berita di draft website jogjaprov admin
  3. Proses publikasi akan dilakukan oleh editor, evaluasi dilakukan oleh editor setelah mengedit dan mempublikasikan berita di website

## **Proses Liputan Kegiatan dan Penulisan Berita sampai ke Draft di Website jogjaprov.go.id**

### **1) Liputan**

Pada tahapan liputan akan dibagi menjadi 3 tim yaitu reporter, fotografer dan videografer, tugas reporter akan fokus pada kegiatannya, apa yang dibicarakan, siapa yang hadir, dan akan merekam pembicaraannya sebagai bahan untuk pembuatan berita, sebelumnya reporter harus mengetahui kegiatan apa yang akan diliput dan setidaknya sudah mencari di internet atau berita sebelumnya yang ada di website jogjaprov, agar reporter akan mengetahui alur berita yang nantinya akan ditulis terkait kegiatan tersebut, untuk fotografer tentunya akan mengambil gambar sebagai dokumentasi dan beberapa hasil fotonya akan diunggah di website begitu juga dengan tugas videografer, namun video hanya sebagai dokumentasi jika memang kegiatan tersebut hanya kegiatan kunjungan saja. Ada beberapa hal yang tidak dapat diambil gambar atau videonya, yaitu pada saat Gubernur DIY/ Wakil Gubernur DIY/ Sekda DIY atau pejabat Pemda lainnya sedang makan, minum atau merokok. Dengan begitu humas harus melihat situasi disaat akan mengambil gambar atau video.

### **2) Menulis Berita**

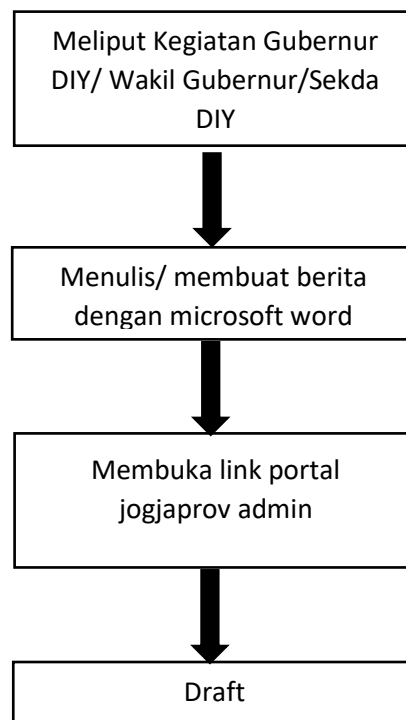
Tahapan penulisan berita akan dilakukan oleh reporter, materi dan rekaman yang sudah didapat akan segera didengarkan dan dibaca lagi oleh reporter dan selanjutnya akan dibuat berita. Berita harus segera dimasukkan ke draft website Pemda DIY agar segera dimuat. Hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan berita adalah nama-nama yang hadir serta gelarnya, kutipan bermakna dari Gubernur DIY, Wakil Gubernur DIY, Sekda DIY, atau pejabat pemerintah yang lainnya, karena sudah menjadi ciri khas berita Pemda DIY dengan mengutip kalimat bermakna dari pejabat Pemda DIY. Sebelum didraft di portal admin jogjaprov, penulis akan terlebih dahulu bertanya kepada staf humas Pemda DIY, apakah berita yang dibuat sudah sesuai dengan teknis penulisan berita di Pemda DIY, jika dirasa sudah cukup penulis akan menyimpan berita di draft website jogjaprov admin.



### 3) Draft Berita

Tahapan selanjutnya yang dilakukan reporter/ penulis adalah memasukan berita yang sudah dibuat ke dalam website jogjaprov admin. Sebelumnya staf humas akan memberikan link, username dan password kepada penulis. Laman ini hanya bisa diakses oleh humas Pemda DIY, karena setiap informasi dan segala hal yang ada di media elektronik dan media sosial hanya bagian humas yang akan bertanggung jawab. Penulis hanya akan sampai pada tahapan draft berita, menyalin beritanya dan memasukannya ke website jogjaprov admin, memberikan hastag terkait berita tersebut, dan menyimpan berita itu didraft, selanjutnya akan diproses oleh editor humas Pemda DIY, seperti mengedit penulisan berita, dan memberikan gambar terkait berita tersebut dan juga mempublikasikan ke website.

Berikut tahapan penulisan berita sampai dimuat ke website Pemda DIY:



Gambar 4.2 Proses Penulisan Berita ke portal jogjaprov admin

Dari beberapa press release yang dibuat oleh penulis dibedakan menjadi dua kegiatan, yaitu kegiatan rutin dan kegiatan permintaan. Kegiatan rutin adalah kegiatan yang selalu dilakukan oleh Pemda DIY seperti FKY, Perayaan Ulang Tahun lembaga atau instansi, dan Kunjungan Kerja luar daerah ke DIY, lalu kegiatan permintaan seperti kegiatan akan dilaksanakan event atau lomba dari lembaga/ instansi, kegiatan luar dinas seperti Sekda DIY Hadiri Rakor Sosialisasi Kebijakan Pembinaan Netralitas dan Disiplin ASN, Retrukturisasi Usaha Bagi Koperasi & UMKM Binaan PLUT-KUMKM DIY. Berita yang ada di website nantinya juga akan dikutip untuk dijadikan sebagai caption yang ada di media sosial Pemda DIY seperti di Intstagram dan Facebook.

Adapun beberapa berita yang dibuat oleh penulis pada saat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan adalah sebagai berikut :

1. Fky 2019, Cakup Kesenian dan Kebudayaan
2. Hadeging Ke-213 Kadipaten Pakualaman Rilis Buku Aristo-Modernis dari Timur
3. Melalui Program MCP, KPK Bantu Pencegahan Korupsi di DIY
4. HUT Ke-37 RSUP Dr Sardjito Gelar Beragam Kegiatan
5. KPK Ajak Kolaborasi Tekan Tindakan Korupsi di Daerah
6. World Kidney Day 2019 Bertema Kidney Health For Everyone and Everywhere
7. DPRD Jawa Barat Konsultasi terkait SDA di DIY
8. Bahas Pencabutan Perda, Bapem Perda DPRD Jawa Tengah Ke DIY
9. IPFE 2019, Sosialisasikan Pengadaan Barang Jasa Akuntable dan Kredible
10. DIY Tuan Rumah Munas Permadani Dikti Nasional 2019
11. DPRD Komisi C Jawa Timur Kunker Ke Pemda DIY
12. Sekda DIY Hadiri Sosialisasi Pmebentukan KPVD
13. Gubernur DIY menerima kunjungan Silaturahmi BPK RI
14. Sekda DIY Hadiri Rakor Sosialisasi Kebijakan Pembinaan Netralitas dan Disiplin ASN
15. Wagub DIY akomodir Pemeriksaan LKPD DIY
16. Penyerahan SK Pengangkatan CPNS Pemda DIY Formasi 2018 oleh Sekda DIY

17. Retrukturisasi Usaha Bagi Koperasi & UMKM Binaan PLUT-KUMKM DIY
18. Pemkot Ambon Konsultasi SAKIP di Pemda DIY
19. KPK ingin Optimalkan Pendapatan Asli Daerah DIY
20. Menjelang Ramadhan Stok Bahan Pangan Pokok di DIY Aman
21. Pemilu 2019 di DIY Berjalan Aman dan Lancar

Dan berikut adalah press release yang dibuat oleh penulis dan telah diunggah di website jogjaprovo.go.id :



PEMERINTAH DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

### FKY 2019, Cakup Kesenian dan Kebudayaan

by [Humas](#)  
12 Februari 2019



Berita Informasi

Yogyakarta (12/02/2019) jogjaprovo.go.id – Festival Kesenian Yogyakarta (FKY) ke-31 tahun 2019 rencananya tidak lagi hanya mengangkat kesenian saja, tapi menjadi Festival Kebudayaan Yogyakarta. Untuk itu, FKY 2019 mengangkat tema ‘Reidentifikasi maupun *Ready Finding* Kebudayaan Yogyakarta’.

Hal ini dikemukakan oleh Ketua Umum FKY 2019 Faksi Laras Alip usai bertemu dengan Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, Selasa (12/02). Bertempat di Gedhong Pare Anom, Kepatihan, Yogyakarta, Alip mengatakan, penyelenggaraan FKY 2019 bermaksud untuk memperlihatkan seperti apa kebudayaan Yogyakarta. Harapannya agar kebudayaan Yogyakarta mampu direpresentasikan dan diterjemahkan kepada publik serta dapat diterima masyarakat.

“Ini tantangan terbesar bagi kami, karena FKY sekarang sudah bukan lagi festival kesenian saja, tetapi festival kebudayaan juga. Kami harus menerjemahkan kebudayaan dalam bentuk FKY yang sudah ada di dalam pemikiran masyarakat Yogyakarta, karena lingkup kebudayaan sangat luas,” ungkapnya.

FKY adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan untuk melestarikan kesenian di Yogyakarta. FKY juga identik dengan pemuda. Panitia sendiri mengharapkan tamu yang akan datang ke FKY tahun ini juga berasal dari negara lain. Dengan begitu, acara FKY menjadi agenda wisata bagi wisatawan mancanegara.

Dalam pertemuan ini, Alip pun memohon izin dan restu dari Wakil Gubernur DIY untuk menjalankan tugas dalam acara FKY 2019 agar berjalan dengan baik dan lancar. FKY rencananya akan dilaksanakan pada bulan Juli 2019.

Wakil Gubernur DIY berharap, pelaksanaan FKY dapat berkolaborasi dengan Barahmus (Badan Musyawarah Museum) dan Dinas Kebudayaan DIY. Tujuannya agar dapat mengembangkan museum-museum dan budaya yang ada di Yogyakarta. Ini karena Yogyakarta tidak didorong menjadi kota wisata, tetapi kota budaya.

“Dengan kolaborasi ini, diharapkan juga bisa menunjang minat berkunjung ke museum. Karena selama ini hanya orang-orang tertentu atau khusus saja yang tertarik datang ke museum. FKY juga diharapkan dapat mengubah *mindset* masyarakat tentang museum,” ungkap Sri Paduka.

Ki Bambang Widodo selaku Ketua Umum Barahmus DIY mengungkapkan, tantangan yang harus dihadapi adalah bagaimana cara membuat masyarakat untuk tertarik dengan museum. Untuk itu, pengelolaan museum harus menyesuaikan minat masyarakat di era teknologi ini.

"Misalnya saja, bagaimana kita melakukan publikasi melalui media sosial, sehingga masyarakat tertarik dengan museum. Di samping itu, koleksi yang ada di museum bisa menjadi daya tarik untuk masyarakat," ungkapnya.

Ki Bambang menambahkan, Barahmus juga akan gelar potensi museum berupa pameran yang menampilkan 38 anggota Barahmus. Ia berharap, FKY bisa menjadi daya tarik bagi generasi muda untuk lebih mencintai kebudayaan Indonesia. **(\*sa/ph)**



## Hadeging Ke-213 Kadipaten Pakualaman rilis Buku Aristo-Modernis dari Timur

by Humas

14 Februari 2019

### **Berita, Informasi**

Yogyakarta (14/02/2019) jogjaprovo.go.id – Dalam rangka memperingati acara Hadeging Ke-213 Kadipaten Pakualaman, Buku Aristo-Modernis dari Timur diluncurkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengulas sejarah pendidikan pada masa Paku Alam V.

Hal tersebut disampaikan oleh panita acara Hadeging ke-213 Kadipaten Pakualaman saat melakukan kunjungan kepada Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X terkait dengan peluncuran buku tersebut, Kamis (14/02) di Gedhong Pare Anom, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.

Ny. Citropanambang, S.S, M. Hum Ketua Bidang III yang membidangi perlombaan, bakti sosial dan peluncuran buku, menyampaikan bahwa buku Aristo-Modernis dari Timur ini berisi tentang masa Paku Alam V saat reformasi berlangsung dari bidang ekonomi dan pendidikan.

Buku ini menceritakan saat Paku Alam V menyekolahkan putra, putri dan kerabatnya di Negeri Belanda. Seorang darah biru di kemudian hari tidak hanya bertopang dagu dengan kebangsawanannya, tapi mereka harus mengerti bahwa banyak tantangan dan tidak bisa hanya bermodalkan bangsawan saja. Dari situlah muncul banyak Universitas di kalangan Pakualaman, untuk mendapatkan ilmu modern dari Barat dan menjadi bekal di kemudian hari. Terbukti bahwa Pakualaman memiliki kekuatan lebih di antara 4 kerajaan yang ada, yaitu terletak pada pendidikan pada masa Paku Alam V.

Buku Aristo-Modernis dari Timur ini ditulis oleh, Dr. Sudiby, Sri Ratna Sakti Mulya, Sri Margana, Mutiah Amini, dan Baha Udin dari berbagai sumber, naskah, dan arsip yang diteliti sejak tahun 2015 hingga akhirnya diluncurkan pada tahun 2019. Acara peluncuran buku ini akan dilaksanakan di Kagungan Ndalem Bangsal Kepatihan Pakualaman, Jumat (15/02), 19.00 WIB dengan mengundang Prof. Petter kery.

Acara ini dipublikasikan melalui media sosial instagram Kepatihan Pakualaman. Antusiasme masyarakat sangat besar saat diadakannya acara ini, terbukti dengan banyaknya peserta pada saat 2 hari sebelum pendaftaran dimulai, panitia hanya menargetkan peserta sejumlah 200 namun peserta yang mendaftar mencapai 250 peserta. Oleh sebab itu, panitia membatasi peserta yang bisa hadir dalam acara peluncuran buku Aristo-Modernis dari Timur, dikarenakan memang menyesuaikan dengan tempat yang ada di Pakualaman.

Acara ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang sejarah Paku Alam V kepada masyarakat terutama warga Yogyakarta. "Semoga kami bisa menjamu dengan baik para tamu dan mengenalkan sejarah tentang Pakualam V," ujar Citropanambang.

Dalam pertemuannya dengan Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X membahas mengenai isi buku yang akan dirilis, juga memohon doa dan restu untuk kelancaran acara yang akan dilaksanakan. Wakil Gubernur DIY berharap semoga buku Aristo-Modernis dari Timur dapat mengedukasi dan memberi pemahaman khususnya kepada warga Yogyakarta terkait bagaimana berdirinya Pakualaman ini.

"Silahkan menulis sebanyak-banyaknya, asal tidak bohong," ungkap Sri Paduka. (\*ph)



## Melalui Program MCP, KPK Bantu Pencegahan Korupsi di DIY

by Humas

20 Februari 2019

**Berita** **Daerah Istimewa Yogyakarta**, **Informasi** **Pemda DIY**

Yogyakarta (20/02/2019) jogjaprovo.go.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Rabu (20/02) pukul 10.00, melakukan rapat koordinasi dengan segenap pejabat publik di DIY terkait dengan realisasi program *Monitoring Center for Prevention (MCP)*. Adapun sejumlah pejabat yang hadir dalam kegiatan yang digelar di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan, ini antara lain Sekda DIY, Inspektur DIY, Bappeda, dan segenap perwakilan dari BKD DIY, BPKAD DIY, dan Diskominfo DIY. Sebelum rapat berlangsung, terlebih dulu rombongan KPK diterima oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.

Kehadiran MCP sejatinya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk membangun suatu kerangka kerja yang dapat digunakan untuk memahami elemen-elemen risiko korupsi. Elemen tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan sektor, wilayah, atau instansi yang rentan terhadap korupsi dan menerjemahkan pemahaman tersebut menjadi gambaran strategis dan prioritas rekomendasi yang akan memberikan arahan bagi upaya pencegahan korupsi. Inspektur DIY menuturkan bahwa implementasi MCP di DIY rata-rata masih berada di angka 73%. Adapun rinciannya antara lain: Pencapaian program perencanaan dan penganggaran APBD 79%, Barang Jasa 75%, Layanan Terpadu 1 pintu 81%, Kapabilitas APBD 82%, Manajemen ASM 76%, dan Manajemen Aset 97%. Sedangkan Optimalisasi Pendapatan Daerah masih berada di angka terendah yakni 16%.

Menurut Kunto Ariawan selaku Koordinator Wilayah KPK, terdapat beberapa program pencegahan yang ditawarkan dari KPK kepada pemerintah DIY. Beliau menuturkan, sampai dengan awal tahun 2019, angka 73% persen tersebut masih menjadi indikasi bahwa progres pemerintah DIY cukup baik. Harapannya, capaian ini dapat menjadi contoh pemerintah kota yang masih berada di angka 53%.

Di sisi lain, guna pencapaian angka maksimal, Analisis Standar Belanja menjadi salah satu faktor yang perlu ada dalam setiap kegiatan perencanaan. Di sisi lain, adanya integrasi aplikasi rencana dengan penganggaran juga perlu mendapat perhatian misalnya program PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Sebab, selama ini masih ada permintaan rekomendasi teknis yang belum dapat dilaksanakan dalam PTSP.

KPK menambahkan bahwa melalui program-program tersebut, pemerintah dapat mengoptimalkan pendapatan daerah. Pendapatan tersebut nantinya akan dijadikan sebagai sumber APBD yang akan kembali lagi kepada instansi tersebut. Salah satu pos yang bisa dioptimalkan adalah menilik dan menganalisis kembali jenis pajak yang dapat ditarik oleh pemerintah termasuk mekanisme pemungutannya.

Untuk bisa dikatakan mencapai 100%, implementasi program MCP harus diuji validasinya melalui survei integritas. Survei tersebut akan memiliki validasi yang kuat apabila melibatkan beberapa pihak, yakni instansi yang bersangkutan dan pegawai yang berada di dalamnya, pengguna jasa dan layanan, dan para ahli. Dari survei tersebut, akan terlihat area yang rentan terjadi penyimpangan sehingga bisa segera merencanakan kegiatan preventif ataupun solusi guna tetap menjaga kepercayaan publik.

"Kita akan menjadikan survei itu sebagai *baseline* untuk perbaikan kita, seharusnya kan kalau MCP bagus, dan program yang di jalankan sudah 100% survei yang di lakukan juga harus 100%, jika hasil survei dan hasil MCP tidak sebanding pasti ada yang perlu diperbaiki lagi," pungkas Kunto. (\*vna/ph)

HUMAS DIY



## HUT ke-37, RSUP Dr Sardjito Gelar Beragam Kegiatan

by Humas

25 Februari 2019

[Berita, Daerah Istimewa Yogyakarta, Informasi](#)

Yogyakarta (25/02/2019) [jogjaprov.go.id](http://jogjaprov.go.id) - Dalam rangka peringatan HUT ke-37 Tahun, RSUP Dr.Sardjito akan menggelar beragam kegiatan, meliputi pagelaran wayang kulit, pameran, peresmian gedung, *talkshow* dan lainnya. pada perayaan tahun ini RS Sardjito mengangkat tema 'RSUP Dr. Sardjito Semakin Dekat Dengan Rakyat'.

Hal ini dikemukakan oleh Direktur Utama RSUP Dr. Sardjito Dr. dr. Darwito usai bertemu dengan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta KGPAA Paku Alam X, Senin (25/02) di Gedhong Pare Anom, Kepatihan, Yogyakarta. Darwito mengatakan, penyelenggaraan HUT ke-37 tahun RS Sardjito bermaksud untuk memperlihatkan bagaimana RS Sardjito berperan pada masyarakat, harapannya agar RS Sardjito dikenal oleh masyarakat umum.

Sardjito *fair* akan menyelenggarakan pagelaran wayang kulit bersamaan dengan peresmian gedung jantung terpadu yang akan diresmikan oleh Kementerian Kesehatan. Acara tersebut dilaksanakan di halaman rawat jalan RS Dr. Sardjito tanggal 17 Maret pukul 18.00, dengan menghadirkan dalang Ki Seno Nugroho, yang sudah cukup terkenal di kalangan masyarakat. Selain untuk memperingati HUT Ke-37 RS Sardjito, diharapkan masyarakat yang hadir bisa mencintai dan melestarikan budaya Jawa.

"Diharap kedepannya RS Dr. Sardjito punya satu ikon, kalau ulang tahun mengadakan pagelaran wayang dan menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu masyarakat," ungkap Darwito.

Kepala Promosi Kesehatan RSUP Dr Sardjito Sri Rahayu Skep, NS mengungkapkan, adapun serangkaian acaranya antara lain, tirakatan, tabur bunga di makam pahlawan pejuang RS Sardjito, orasi ilmiah terkait dengan cangkok ginjal yang memang sedang gencar di lakukan oleh RS Sardjito, *talkshow* dan tanya jawab dengan dokter RS Sardjito mengenai cangkok ginjal, senam massal, serta pelayanan kesehatan masyarakat.

Selain itu juga ada mediart pada tanggal 20 sampai dengan 22 Maret 2019, yang akan melibatkan beberapa UKM di Yogyakarta, baik kuliner, pengrajin, juga terdapat produk-produk karyawan RS Sardjito yang dijual saat acara berlangsung. Acara akan ditutup pada tanggal 31 Maret dengan kegiatan *fun run* dan *fun work*.

"Semoga acara sukses dan lancar semuanya, juga RS Dr. Sardjito bisa dekat dan dicintai oleh masyarakat, selain itu RS Dr. Sardjito mampu memfasilitasi masyarakat khususnya rakyat Yogyakarta," ungkap Sri Rahayu.

Pada kesempatan tersebut, Darwito memohon doa restu sekaligus mengundang Wakil Gubernur DIY untuk dapat hadir dalam acara HUT 37 Tahun RSUP Dr. Sardjito.

"Kalau Tema HUT RS Dr. Sardjito semakin dekat dengan rakyat, sebenarnya untuk warga Yogyakarta kedekatan dengan Sradjito sudah tidak asing lagi," ungkap Sri Paduka.

Sementara itu, Wakil Gubernur DIY berharap agar selanjutnya di RS Sardjito memiliki prinsipal perunit dan diberikan fasilitas untuk mengembangkan instalansi. "Jadi Dokter hanya fokus untuk menyembuhkan pasien tanpa harus memikirkan lokasinya dimana," ungkap Sri Paduka. (\*/ph)

HUMAS DIY

# KPK Ajak Kolaborasi Tekan Tindakan Korupsi di Daerah

by Humas

22 Februari 2019

[Berita](#), [Daerah Istimewa Yogyakarta](#), [Informasi](#), [Pemda DIY](#)



Yogyakarta (22/02/19) [jogjaprov.go.id](http://jogjaprov.go.id) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kegiatan Kolaboratif Unit Koordinasi Wilayah. Berlokasi di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta pada Jumat (22/02) pagi. Diskusi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta ini terkait Kolaborasi Unit Penindakan dan Pencegahan.

Pertemuan kali ini menindaklanjuti diskusi yang telah digelar sebelumnya terkait realisasi program *Monitoring Center for Prevention (MCP)*. Adapun sejumlah pejabat yang hadir dalam kegiatan ini antara lain, Inspektur DIY M. Setiadi, dan segenap perwakilan dari POLRI, Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), dan Dinas Pengelola Aset se-DIY.

Kunto Ariawan selaku Koordinator Wilayah KPK menjelaskan, tujuan kolaborasi antara pencegahan dan penindakan yaitu untuk mendorong pemerintahan di DIY mencari adanya dugaan-dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK), yang perlu di bawa ke aparat penegak hukum. Kolaborasi ini lebih fokus ke penguatan aset dan manajemen sumber pengelolaan barang milik daerah.

Kunto menyebutkan, tugas-tugas kolaboratif wilayah KPK antara lain, sistem integritas nasional yang berisi kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan pelaporan gratifikasi, pengaduan masyarakat, penguatan APIP, dan pengelolaan barang milik daerah.

"Kalau dulu hanya mengenal koordinasi dan supervisi penindakan (Korsupdak) atau koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsupgah) sekarang sudah digabung di bawah unit koordinasi wilayah, yang nantinya akan menjadi cikal bakal kantor cabang KPK," ujar Kunto.

Fikri selaku pegawai KPK dari unsur kejaksaan menuturkan, sesuai dengan peraturan komisi terakhir, kegiatan koordinasi ini harus membentuk koordinator wilayah. Koordinator wilayah akan meliputi, satuan tugas dari kejaksaan dari unit penindakan dan pencegahan. Kemudian satuan tugas akan saling bekerja sama, sebagai upaya untuk saling bersinergi dalam pencegahan dan juga penindakan kasus-kasus korupsi di Indonesia.

Sesuai dengan peraturan komisi terkait adanya penguatan APIP, yang harus di monitoring dari sisi anggaran, personil, dan kapabilitas. Mengenai pengaduan, masyarakat bisa mengadukannya ke Pemda DIY atau langsung ke KPK. "Kaitan pengaduan masyarakat ini harus di seleksi untuk bisa ditindaklanjuti dengan pidana," ujar Fikri. (\*ph)

HUMAS DIY





## World Kidney Day 2019 Bertema *Kidney Health for Everyone and Everywhere*

01 Maret 2019

[Berita](#), [Daerah Istimewa Yogyakarta](#), [Informasi](#)



Yogyakarta (01/03/2019) [jogjaprov.go.id](http://jogjaprov.go.id) - *World Kidney Day* kembali diselenggarakan pada tanggal (14/03/2019) yang bertempat di RS Dr. Sardjito. Untuk tahun ini tema yang diangkat yaitu "*Kidney Health for Everyone and Everywhere*". Untuk mengingatkan kepada masyarakat betapa pentingnya kesehatan pada ginjal. Hal ini disampaikan oleh Ketua Panitia *World Kidney Day 2019*, dr. Heru Prasanto, Sp.PD-KGH usai bertemu dengan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta KGPAA Paku Alam X. Jumat (01/03) di Gedhong Pare Anom, Kepatihan, Yogyakarta.

Berkaitan dengan tema Hari Ginjal Sedunia yaitu untuk promotif preventif, dalam artian bagi orang yang belum sakit ginjal atau yang sudah menjalani pengobatan, agar mencapai kualitas hidup yang baik. Terdapat pilihan-pilihan untuk mengatasi penyakit ginjal itu. Juga mengedukasi masyarakat agar lebih memperhatikan dan memelihara kesehatan ginjal.

Hari Ginjal Sedunia menjadi kegiatan rutin tiap tahunnya yang dilaksanakan pada minggu kedua di bulan Maret. Acara kali ini akan mengedukasi masyarakat terkait pengobatan cangkok ginjal yang sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh RS Dr.Sardjito.

Dalam perayaan Hari Ginjal Sedunia 2019 terdapat beberapa rangkaian acara, yaitu pada (10/03) Masyarakat *Talkshow* di Jogja City Mall (JCM), Puncak Acara (14/03) Edukasi kepada petugas-petugas pusat hemodialis di RS Dr. Sardjito, dan (17/03) bergabung dengan acara Sardjito Fair, terdapat stand untuk informasi dan pelayanan khusus kesehatan ginjal.

"Acara ini untuk meningkatkan *awareness* atau kepedulian dari masyarakat untuk menjaga kesehatan pada ginjal", ungkap Heru.

Ditambahkan oleh Kepala Koordinator Wilayah Perhimpunan Nefrologi Indonesia (Pernefri) dr. Iri Kuswadi, Sp.PD-KGH,

"Mengedukasi masyarakat terkait penyakit-penyakit yang dapat menyerang ginjal, sehingga masyarakat dapat mencegah terjadinya penyakit ginjal", ungkap Kuswadi.

Dalam pertemuan kali ini, Heru memohon doa restu dan juga mengundang Wakil Gubernur DIY untuk hadir dalam puncak acara *World Kidney Day*.

Sementara itu Wakil Gubernur DIY sangat mengapresiasi adanya kegiatan tersebut. "Transplantasi atau cangkok ginjal adalah penanganan paripurna ketika hemodialisis harus dilakukan, karena sebenarnya lebih menghemat biaya, juga lebih berkualitas jika melakukan cangkok ginjal", ungkap Sri Paduka. (\*/ph).

HUMAS DIY



## DPRD Jawa Barat Konsultasi terkait SDA di DIY

by Humas

04 Maret 2019

[Berita](#), [Daerah Istimewa Yogyakarta](#), [Jogja](#)



Yogyakarta (04/03/2019) [jogjaprov.go.id](http://jogjaprov.go.id) - 'Pendekatan anggaran APBD DIY terhadap kualitas produk, infrastruktur dan pengembangan teknologi yang berkaitan dengan masalah kehutanan dan perkebunan', menjadi topik utama diskusi dan konsultasi Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat saat melakukan kunjungan kerja ke Pemda DIY di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (04/03).

Rombongan Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat yang dipimpin Didi Sukardi SE, diterima oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY Drs. Tri Saktiyana, M.Si. Didi menyampaikan, tujuan dari kunjungan tersebut dalam rangka silaturahmi dan konsultasi mengenai pendekatan anggaran APBD untuk pengelolaan kehutanan dan perkebunan yang ada di DIY.

"Kita ingin mendapatkan masukan terkait manajemen pengelolaan perkebunan rakyat. Seperti apa kebijakan dari DIY, yang ujung-ujungnya meningkatkan kesejahteraan rakyat dari sektor kehutanan dan perkebunan", ujar Didi.

Dalam kesempatan yang sama, Tri mengungkapkan bahwa DIY tidak mempunyai sumber-sumber daya alam yang melimpah, termasuk dengan sumber daya kehutanannya yang tidak begitu luas. "Namun pemanfaatan kehutanan tidak hanya sebagai fungsi konservasi tetapi juga memiliki fungsi ekonomi", ungkap Tri.

Pada pertemuan tersebut disampaikan bahwa upaya Pemda DIY dalam melestarikan fungsi-fungsi konservasi kehutanan itu harus selaras dan seiring dengan fungsi ekonomisasi, misalnya dengan tata kelola pariwisata, dan juga jangan sampai fungsi ekonomisasi merusak hutan.

Atau sebaliknya, fungsi konservasi hutan tidak mampu meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Begitu juga dengan produk-produk perkebunannya yang dimanfaatkan untuk membentuk kreatifitas dalam bidang Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) di DIY. (\*p)

HUMAS DIY



## Bahas Pencabutan Perda, Bapem Perda DPRD Jawa Tengah ke Pemda DIY

by Humas

11 Maret 2019

[Berita](#), [Daerah Istimewa Yogyakarta](#), [Informasi](#), [Pemda DIY](#)



Yogyakarta (11/03/2019) [jogjaprovo.go.id](http://jogjaprovo.go.id) – Badan Pembentuk Peraturan Daerah DPRD Provinsi Jawa Tengah melakukan kunjungan kerja ke Pemda DIY dalam rangka pembahasan Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah, berlokasi di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta pada Senin (11/03).

Hal ini disampaikan oleh Pimpinan Rombongan Bapem Perda DPRD Provinsi Jawa Tengah Yudi Indras Wiendarto, SE. Pada kegiatan itu diungkapkan bahwa pencabutan beberapa peraturan daerah dilakukan karena dirasa sudah tidak relevan dengan Undang-Undang saat ini, dan secara kewenangan juga sudah menjadi kewenangan pusat.

Adapun peraturan daerah yang akan dicabut antara lain pertama, Pencabutan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan Ternak. Kedua Perda Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah. Ketiga Perda nomor 15 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Keempat Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Panas Bumi. Dan kelima Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengendalian Muatan Angkutan Barang di Jalan.

“ Hari ini kami bersyukur karena memiliki Biro Hukum yang selalu mendukung kami, dan memiliki staff ahli yang kritis, sehingga segala hal yang kami lakukan dapat berjalan dengan baik dan lancar “, ungkap Yudi.

Dalam kunjungan kerja Bapem Perda DPRD Provinsi Jawa Tengah diterima oleh Staff Ahli Gubernur Bidang Hukum Pemerintah dan Politik Drs. H. Umar Priyono, M.Pd.

Umar mengatakan bahwa ketika ada UU baru, yang mengatur *rule of the king* Yogyakarta yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan pasti ada konsekuensi logis, ini harus diatur oleh Perda Keistimewaan untuk menjalankannya.

“ Kalau dalam bahasa Melayu, sekali merengkuh dayung dua tiga pulau terlampaui, kalau kami banyak Perda terlampaui dengan merubah satu Perda “, ungkap Umar. (\*pr)

HUMAS DIY



## IPFE 2019, Sosialisasikan Pengadaan Barang Jasa Akuntabel dan Kredibel

by Humas

14 Maret 2019

[Berita](#), [Daerah Istimewa Yogyakarta](#), [Informasi](#)



Yogyakarta (14/03/2019) [jogjaprovo.go.id](http://jogjaprovo.go.id) – Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) akan menyelenggarakan kegiatan Indonesia Procurement Forum Dan Expo (IPFE) di Jogja Expo Center (JEC) pada tanggal 19-21 Maret 2019, yang bertema 'Optimizing Procurement in The Digital Economy Era'.

Hal ini dikemukakan oleh Ketua Panitia IPFE Setyanto Putro usai bertemu dengan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, KGPAA Paku Alam X, Kamis (14/03), bertempat di Gedhong Pare Anom, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.

Selain seminar yang membahas mengenai pengadaan produk dan jasa, dalam IPFE ini juga dihadirkan pameran produk barang dan jasa dengan total 60 stand produk barang dan jasa penyedia e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Setyanto selaku ketua panitia menyampaikan bahwa, peserta yang sudah mendaftar sampai saat ini mencapai 1.300 peserta di seluruh Indonesia, dengan pendaftaran secara online dan diharapkan peserta akan terus bertambah sampai acara dimulai.

Kegiatan ini dilaksanakan agar mempermudah bertemunya antar penyedia dengan pelaku pengadaan barang jasa. Ada peningkatan kompetensi dengan diselenggarakannya seminar tersebut, sehingga para pelaku pengadaan menjadi satu koridor yang sama dalam memahami petunjuk dan pedoman yang berlaku.

"Semoga ada kesepahaman yang sama antar pelaku pengadaan, kelompok kerja pemilihan, pejabat pembuat komitmen dan juga dengan penyedia," kata Setyanto.

Sementara itu, Wakil Gubernur DIY berharap agar kegiatan ini dapat memberikan edukasi terkait pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat Indonesia.

"Ketika sudah sepakat membuat organisasi profesi harus solid, dan mengetahui keuntungan atau pemanfaatannya dari organisasi tersebut," ungkap Sri Paduka. (\*/ph)

HUMAS DIY



PEMERINTAH DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

## DIY Tuan Rumah Munas Permadani Dikti Nasional 2019

by Humas

15 Maret 2019

[Berita](#), [Daerah Istimewa Yogyakarta](#), [Informasi](#), [Pendidikan](#)



Yogyakarta (15/03/2019) [jogjaprov.go.id](http://jogjaprov.go.id) – Persatuan Mahasiswa dan Alumni Bidikmisi (Permadani Dikti) akan menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) pada tanggal 22-27 April 2019 yang kali ini akan dilaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan tema 'Kaum Muda Indonesia Menghadapi Revolusi Industri 4.0'.

Munas yang sebelumnya pernah dilaksanakan pada tahun 2017 di Bandar Lampung. Permadani Dikti adalah Forum Mahasiswa dan Alumni Bidikmisi tingkat Nasional yang digagas oleh beberapa orang mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi, untuk memudahkan dalam berkoordinasi atau menjalin komunikasi antar sesama mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi di seluruh Indonesia.

Kegiatan tersebut akan dilaksanakan dengan target audiens sejumlah 400 mahasiswa di seluruh Indonesia, dan saat ini sudah mencapai 120 mahasiswa yang terdaftar. Munas dilaksanakan 2 tahun sekali dan baru tahun ini diselenggarakan di DIY ataupun di Pulau Jawa.

Munas atau sarasehan Permadani Dikti ini bertujuan untuk membentuk kepengurusan Permadani Dikti yang baru, dan memberikan edukasi kepada mahasiswa khususnya dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Kegiatan itu diharapkan juga memberikan masukan kepada Pemerintah Indonesia terkait program Bidikmisi.

Selain musyawarah dan diskusi peserta juga akan diajak untuk wisata keliling Kota Yogyakarta, guna memperkenalkan Yogyakarta sebagai kota pelajar yang memiliki banyak objek wisata kepada peserta Permadani.

Hal ini dikemukakan oleh Kepala Subdirektorat Kesejahteraan UGM Sidik Purnomo M,Si, usai bertemu dengan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, KGPAA Paku Alam X, Jumat (15/03), bertempat di Gedhong Pare Anom, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.

"Semoga kepengurusan ini dapat berkesinambungan dari yang dulu sudah terbentuk, dan dari hasil sarasehan itu nantinya bisa memberikan rekomendasi ke pemerintah," ungkap Sidik.

Wakil Gubernur DIY sangat mendukung dan mengapresiasi kegiatan tersebut yang akan dilaksanakan di Yogyakarta. Dengan adanya Permadani Dikti diharapkan dapat menjadi wadah untuk bertemu atau berkomunikasi serta menjalin relasi.

"Tugas kalian belum selesai, kalian masih punya tanggungjawab untuk mendidik, membimbing, dan melatih adik-adik kalian agar dapat berprestasi juga", ungkap Sri Paduka. (\*/ph)

HUMAS DIY



## DPRD Komisi C Jawa Timur Kunker ke Pemda DIY

by Humas

19 Maret 2019

[Berita](#), [Daerah Istimewa Yogyakarta](#), [Informasi](#), [Pemda DIY](#)



Yogyakarta (19/03/2019) [jogjaprov.go.id](http://jogjaprov.go.id) – Bertempat di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Selasa (19/03) DPRD Komisi C Jawa Timur melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terkait Penanaman Modal khususnya tentang sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan *online single submission* (OSS). Pada kesempatan kali ini Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY Drs. Arief Hidayat menerima langsung kunjungan kerja tersebut.

Kunker DPRD Komisi C Jawa Timur ini dipimpin oleh H. Renville Antonio, S.H., M.H., M.M dan rombongan yang berjumlah 20 orang. Selain dalam rangka silaturahmi, Beliau juga ingin menyampaikan tujuan Kunker ini adalah ingin mengetahui cara pelaksanaan PTSP dengan OSS di DIY.

Drs. Arief Hidayat menyampaikan rasa terimakasih atas kepercayaan DPRD Komisi C Jawa Timur untuk memilih Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka kunjungan kerja dan menyampaikan terkait dengan pelaksanaan OSS dan layanan perizinan di DIY.

Arief menyampaikan bahwa, DIY juga mengalami kondisi yang sama mengenai dinamika PTSP yang selama ini sudah berjalan. Dan menjelaskan beberapa program yang ada di DIY. Antara lain Kerja Sama Luar Negeri, untuk itu sistem yang dijalankan mengampu dua sasaran yang harus dicapai, yaitu Realisasi Investasi dan Kepuasan Masyarakat terkait perizinan dan penanaman modal.

Rencana yang akan dilaksanakan di DIY yaitu sistem Digitalisasi semua hal yang terkait layanan dan informasi perizinan. Hal tersebut dikarenakan untuk mempermudah akses bagi masyarakat. Dan Digitalisasi yang akan dikembangkan adalah aplikasi *tracking* untuk proses izin. Jadi setiap pemohon izin baik yang baru maupun pengembangan dari usahannya, akan diberikan akun agar bisa melaksanakan proses perizinannya.

Arief mengatakan untuk menjadi satu kesamaan sinergi, itu ada namanya *mindset* bagaimana melihat suatu potensi yang nantinya akan menjadi suatu peluang.

“ Buat kami potensi hanya sesuatu yang statis yang ada yang kita pihak, tapi kalau kita olah atau dikelola statis tersebut menjadi siap dikerjasamakan dan siap diinvestasi, itu yang namanya peluang “, ungkap Arief. (\*/ph)

HUMAS DIY



## Sekda DIY Hadiri Sosialisasi Pembentukan KPVD

by Humas

22 Maret 2019

[Berita](#), [Daerah Istimewa Yogyakarta](#), [Ketenagakerjaan](#), [Pemda DIY](#)



Yogyakarta (22/03/2019) [jogjaprov.go.id](http://jogjaprov.go.id) – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melaksanakan sosialisasi terkait pembentukan Komite Pelatihan Vokasi Daerah (KPVD) di DIY, Jumat (22/03) di Ruang Bagaskara Disnakertrans DIY.

KPVD dibentuk dalam upaya meningkatkan kompetensi pekerja Indonesia. Sehingga untuk mendukung hal itu, Pemda DIY khususnya Disnakertrans DIY diminta segera mengembangkannya dan bekerja sama dengan industri yang ada di daerahnya masing-masing.

Kegiatan ini menindaklanjuti surat dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia perihal pembentukan Komite Pelatihan Vokasi Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan ini dihadiri pula oleh Sekretaris Daerah DIY, Ir. Gatot Saptadi.

Gatot menjelaskan, terkait hal-hal yang disampaikan dari Menteri Ketenagakerjaan tentang cara peningkatan SDM, antara lain perlu adanya transparansi lowongan kerja, standar kompetensi, akreditasi lembaga pelatihan, dan yang terpenting tentang sertifikasi.

Angka *human capital indeks* relatif masih menempati tingkat menengah ke bawah, dan menjadi tugas berat bagi pemerintah. Pembangunan ketenagakerjaan menjadi aspek dimensi yang saling berkaitan. Masa kerja ini dipilih terkait dengan kepentingan pengusahanya, pemerintahnya dan secara komperensif saling berkaitan.

Gatot mengatakan, pembangunan harus mereposisi paradigma pada orientasi tenaga kerja dengan perencanaan tenaga kerja, sebagai proses penyusunan ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan. Gatot pun mengungkapkan sangat mendukung terbentuknya komite pelatihan vokasi di daerah DIY.

"Saya atas nama pemerintah daerah mendukung sepenuhnya pembentukan komite pelatihan vokasi daerah, apakah mau berbentuk komite, forum atau yang lainnya tapi yang terpenting bagi kami bahwa aktifitas KPVD dapat berjalan," ungkap Gatot. (\*ph)

HUMAS DIY



## Gubernur DIY Menerima Kunjungan Silaturahmi BPK

RI

by Humas

26 Maret 2019

[Berita, Daerah Istimewa Yogyakarta](#)



Yogyakarta (26/03/2019) jogjaprovo.go.id – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menerima kunjungan silaturahmi Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Ir. Isma Yatun, M.T. Kunjungan diterima di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (26/03) pagi. BPK sekaligus meminta laporan keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) yang *unaudited* untuk diperiksa selama 60 hari ke depan.

Isma menyampaikan bahwa pertemuan dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X ini merupakan kali pertama baginya selama dua tahun menjabat menjadi Anggota V BPK. Ia juga menjelaskan selama masa pemeriksaan 60 hari ke depan, pihaknya diharapkan bisa berdiskusi dengan Pemda DIY. Harapannya, Pemda DIY dapat menyampaikan hal yang dirasa perlu agar laporan keuangan *unaudited* bisa segera diselesaikan.

Isma berharap Pemda DIY bisa mempertahankan opini yang sudah didapat dari tahun-tahun sebelumnya, karena sudah 8 kali berturut-turut Pemda DIY mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). "Hingga saat ini Pemda DIY mampu mempertahankan opini WTP, jadi ini bukanlah suatu hadiah dari BPK melainkan memang kerja keras dari pada Pemda DIY," ungkap Isma.

Dalam kesempatan itu, Sri Sultan Hamengku Buwono X sangat positif menanggapi perihal ini. Sultan menyatakan bahwa untuk mempertahankan opini WTP selama kurun waktu 8 tahun terakhir ini tidaklah mudah. Sri Sultan Hamengku Buwono X akan bekerja keras untuk mempertahankan opini WTP yang sudah ada. (\*ph)

HUMAS DIY





## Sekda DIY Hadiri Rakor Sosialisasi Kebijakan Pembinaan Netralitas dan Disiplin ASN

by Humas

28 Maret 2019

**[Berita, Daerah Istimewa Yogyakarta, Informasi](#)**

Yogyakarta (28/03/2019) [jogjaprov.go.id](http://jogjaprov.go.id) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Republik Indonesia (RI) mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sosialisasi Kebijakan Pembinaan Netralitas dan Disiplin ASN, yang dihadiri oleh Sekertaris Daerah (Sekda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Ir. Gatot Saptadi di Hotel Tentrem Yogyakarta, Kamis (28/03).

Pada kegiatan tersebut, Asisten Deputi Pembinaan Integritas dan Penegakan Disiplin Kemenpan RB RI Ir. Bambang D. Sumarsono, MPA menyampaikan ucapan terimakasih dan melaporkan pelaksanaan Rakor dan Sosialisasi Kebijakan Pembinaan Netralitas dan Disiplin ASN.

Disebutkan Bambang Sumarsono, Kemenpan RB akan menyelenggarakan kegiatan seperti ini secara maraton di tiga titik, yaitu di Yogyakarta, Medan, Samarinda. Selain itu, momentum penyelenggaraan kegiatan ini dilaksanakan bertepatan dengan Pemilu serentak 2019.

Selanjutnya, Bambang menyampaikan bahwa pada saat Pemilu, Kemenpan RB selalu menerbitkan surat edaran yang sifatnya mengingatkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mengingatkan kepada ASN agar bersifat netral. "Terimakasih kepada Pemda DIY yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini", ungkap Bambang.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Ir. Gatot Saptadi menyambut baik dan mengapresiasi Rakor dan Sosialisasi Regulasi Terkait Pembinaan Integritas dan Penekanan Disiplin Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintah yang diselenggarakan oleh Kemenpan RB RI.

Gatot menambahkan, kegiatan ini diharapkan dapat berjalan baik dan lancar serta menghasilkan rekomendasi untuk mendukung grand desain pembangunan ASN 2020-2024 menuju terwujudnya *smart* ASN.

Dalam rangka melaksanakan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara, menurut Gatot, perlu dibangun ASN yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik serta bersih dari praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, ASN diharapkan mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan dapat menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI 1945.

Gatot menjelaskan, dalam mewujudkan upaya-upaya tersebut maka harus memahami dan menghayati benar-benar paradigma baru tentang penyelenggaraan pelayanan aparatur pemerintah yang dibutuhkan pada saat ini, yaitu satu paradigma yang menempatkan tentang kepuasan pelayanan kepada masyarakat diatas segala-galanya.

Sebagai aparatur pemerintah, Gatot menyampaikan, harus memiliki tekad yang kuat dan bulat didasari dengan rasa tanggung jawab, baik terhadap pemerintah ataupun masyarakat luas lagi terhadap bangsa dan negara dalam mengabdikan diri sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

"Tentunya sebagai aparatur pemerintah maka posisi aparatur merupakan unsur pelaksana pembangunan dengan mengemban tugas sebagai pelayan masyarakat sekaligus sebagai pemersatu bangsa yang senantiasa dituntun dapat berperan dalam menciptakan iklim pemerintahan yang baik", ungkap Gatot. (\*/ph)

HUMAS DIY



PEMERINTAH DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

## Wagub DIY Akomodir Pemeriksaan LKPD DIY

by Humas

29 Maret 2019

**Berita**



Yogyakarta (29/03/2019) jogjaprovo.go.id – Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X menyambut baik kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Rinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemda DIY Tahun Anggaran 2018 oleh Badan Pengawasan Keuangan (BPK) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Gedhong Pare Anom, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Jumat (29/03).

Kehadiran Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi DIY, Yusnadewi, SE., M.Si, Ak beserta tim bertujuan untuk melakukan *entry meeting* untuk pemeriksaan secara rinci terkait LKPD yang sebelumnya diberikan Pemda DIY kepada BPK. Yusnadewi juga menyinggung mengenai jangka waktu pemeriksaan yang akan dilakukan selama 32 hari, dimulai pada tanggal 1 April 2019 hingga 6 Mei 2019.

Pemeriksaan yang dilakukan BPK ini bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai, apakah LKPD disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau basis akuntansi komprehensif. Yusnadewi sangat mengapresiasi dan bangga atas kerja keras Pemda DIY dalam menyelesaikan LKPD yang dirasa sudah lengkap, tidak ada lagi kesalahan angka secara *analytical review* dan sudah baik dari tahun sebelumnya.

“Semoga pemeriksaan ini dapat berjalan dengan baik, lancar dan hasilnya tetap seperti apa yang kita harapkan, Semoga apa yang kita laksanakan ini menjadi amal ibadah untuk kita, membawa manfaat bagi masyarakat khususnya,” ungkap Yusnadewi.

Dalam kesempatan itu KGPAA Paku Alam X menyampaikan ucapan terimakasih atas kedatangan BPK Perwakilan Provinsi DIY. “Harapan saya Kepala OPD dan Kepala Bidang, untuk bisa membantu berkoordinasi terkait dengan informasi keterangan apa saja yang dibutuhkan pada pemeriksaan LKPD Pemda DIY,” ungkap Sri Paduka. (\*/ph)

HUMAS DIY



## Penyerahan SK Pengangkatan CPNS Pemda DIY Formasi 2018 oleh SEKDA DIY

by [Humas](#)

04 April 2019

[Berita](#), [Informasi](#), [Ketenagakerjaan](#)

Yogyakarta (04/04/2019) [jogjaprov.go.id](http://jogjaprov.go.id) – Sekertaris Daerah (Sekda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Ir. Gatot Saptadi menyerahkan Surat

Keputusan (SK) pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Daerah (Pemda) DIY Formasi Tahun 2018 dari pelamar umum kepada 758 orang di Bangsal Kepatihan, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta Kamis (04/04).

Dalam Sambutannya Sekda DIY menyampaikan bahwa CPNS ini adalah orang-orang pilihan yang disebut juga CPNS Milenial, diharapkan menjadi energi baru bagi Pemerintah DIY dan harus memegang teguh dan menghayati nilai-nilai organisasi di Lingkungan Pemda DIY. CPNS harus bisa menjaga Integritas, Profesional, Visioner, Sinergi, dan Akuntabel.

Disampaikan pula bahwa selama ini karir PNS dianggap sebagai Zona Nyaman/ *Comfort Zone* tetapi dengan lahirnya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah membawa perubahan dalam kehidupan karir PNS dan sekarang menjadi Zona Kompetitif/ *Competitive Zone*.

Sekda DIY juga mengungkapkan bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan DIY, yaitu *Hamemayu Hayuning Bawana*, sebagai cita-cita luhur untuk menyempurnakan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta berdasarkan *nilai budaya daerah* yang perlu dilestarikan dan dikembangkan. Dan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur melalui pemberian pelayanan secara prima kepada masyarakat.

“Semoga nasib baik akan mengikuti siapa pun yang berani, karena impian besar hanya milik para ASN pemberani yang memang benar-benar berani dan mampu secara inovatif mengubah impian menjadi kenyataan,” ungkap Gatot.

Selain itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) R. Agus Supriyanto, SH, M.Hum melaporkan bahwa dasar hukum penyelenggaraan kegiatan ini adalah tindaklanjut diterbitkannya SK Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 270 Tahun 2018 tentang Kebutuhan Pegawai ASN, Pemda DIY mendapat formasi CPNS sebanyak 766 formasi. Tetapi dari formasi 766 terdapat 758 formasi yang terisi, 8 diantara yang tidak terisi dikarenakan tidak ada pendaftar atau tidak ada pendaftar yang lolos *passing grade* juga terdapat peserta yang mengundurkan diri.

Agus mengungkapkan CPNS yang diterima akan menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun, dimana 1 tahun tersebut merupakan masa penjabatan yang dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan secara terintegrasi untuk melalui proses integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.

“Semoga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) segera turun persetujuannya dan dapat NIP agar segera bekerja,” ungkap Agus.

Adapun CPNS Disabilitas yang ikut serta dalam kegiatan ini yakni Reni Margatina yang berasal dari Temanggung Jawa Tengah menyampaikan “Tetap semangat dan jangan patah semangat dan selalu berusaha karena Tuhan akan memberi jalan ketika kita selalu semangat dan berdoa,” ungkap Reni. (\*/ph)

HUMAS DIY



## Restrukturisasi Usaha Bagi Koperasi & UMKM Binaan PLUT-KUMKM DIY

by Humas

02 April 2019

[Berita, Daerah Istimewa Yogyakarta](#)

Yogyakarta (02/04/2019) jogjaprovo.go.id – Restrukturisasi Usaha bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) merupakan hal penting dilakukan dalam upaya menjaga stabilitas kinerja KUMKM dan menjadikan KUMKM memiliki daya saing yang terus terjaga dan jangan sampai gulung tikar alias tutup usahanya.

Hal tersebut dikatakan Asisten Deputi Pemetaan Kondisi dan Peluang Usaha, Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, Dra. Sri Istiyati saat membuka Pelaksanaan Restrukturisasi Usaha kepada Koperasi dan UMKM binaan PLUT-KUMKM/Centre For Integrated Services of SMESCO (CIS) bagi Konsultan PLUT, Pendamping KUMKM (Konsultan Keuangan Mitra Bank/KKMB, Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan/PPKL, Inkubator bisnis), Pengurus Koperasi dan UMKM untuk Provinsi D.I Yogyakarta di PLUT-KUMKM, Jl. HOS Cokroaminoto No. 162, Selasa (02/04).

Sri Istiyati mengatakan Pelaksanaan Restrukturisasi Usaha kepada Koperasi dan UMKM binaan PLUT-KUMKM ini diselenggarakan dalam rangka memberikan pemahaman bagaimana melakukan proses Pelaksanaan Restrukturisasi Usaha kepada KUMKM yang benar sesuai aturan yang berlaku. Untuk melakukan Restrukturisasi Usaha para konsultan PLUT dan Pendamping KUMKM perlu terlebih dahulu mengukur kondisi kesehatan Koperasi dan UMKM yang akan direstrukturisasi, sehingga mengetahui bagaimana kondisi usahanya sebelum dilakukan restrukturisasi apakah usahanya sehat, kurang sehat atau tidak sehat.

Dalam mengukur kondisi kinerja Koperasi dan UMKM tersebut, Kemenkop dan UKM telah menyediakan Aplikasi Sistem Peringatan Dini / *Early Warning System (EWS)* sebagai alat diagnosa kinerja usaha Koperasi dan UMKM. Sistem ini mampu mendeteksi dari 3 aspek yaitu aspek kelembagaan atau organisasi, aspek finansial atau keuangan dan aspek portofolio bisnis atau usaha.

Selain Aplikasi EWS juga telah disiapkan *Skema* dan *Standar Operasional Prosedur (SOP)* untuk memberikan solusi yang tepat dan benar. Sehingga aspek-aspek yang dinilai kurang sehat dapat ditata kembali agar sehat dan tetap berdaya saing. Restrukturisasi usaha tidak hanya dilakukan pada saat usaha KUMKM mengalami penurunan usahanya. Restrukturisasi juga harus dilakukan secara terus-menerus agar kinerja Koperasi dan UMKM lebih baik. Jadi dalam melakukan restrukturisasi usaha ini, para pelaku usaha KUMKM harus didampingi oleh para konsultan dan para pendamping sampai usahanya baik kembali.

Sri Istiyati menambahkan dengan adanya Pelaksanaan Restrukturisasi Usaha ini, diharapkan para Konsultan PLUT dan pendamping KUMKM dapat memanfaatkan dengan baik EWS, Skema dan SOP yang merupakan satu paket alat untuk melakukan restrukturisasi usaha Koperasi dan UMKM dengan benar.

“ Kita menyadari bahwa perubahan pasar di era ekonomi digital ini begitu cepat dan sulit ditebak, maka setiap KUMKM harus waspada dan terus mengevaluasi kinerja usahanya, yang kurang efektif dan efisien, harus diperbaiki, ditata kembali atau direstrukturisasi, kuncinya harus kreatif dan inovatif,” ungkap Sri.

Sementara itu salah seorang konsultan PLUT-KUMKM Provinsi D.I Yogyakarta, Yuli Apriyandi mengatakan kegiatan Pelaksanaan Restrukturisasi Usaha kepada Koperasi dan UMKM binaan PLUT-KUMKM yang digelar ini, sangat membantu mereka dalam memberikan pemahaman yang lebih baik lagi terhadap kinerja KUMKM yang selama ini mereka dampingi. Pelaku UMKM merasa sangat terbantu dan kondisi kerjanya saat ini lebih baik lagi dengan adanya Restrukturisasi Usaha Kepada Koperasi dan UMKM. (\*/ph)



## Pemkot Ambon Konsultasi SAKIP Di Pemda DIY

by Humas

09 April 2019

[Berita, Daerah Istimewa Yogyakarta](#)



Yogyakarta (09/04/2019) [jogjaprov.go.id](http://jogjaprov.go.id) - Kunjungan Kerja TIM SAKIP Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon ke Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam rangka penataan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Pemkot Ambon, bertempat di Ruang C BAPPEDA, Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Selasa (09/04). Pada kesempatan kali ini Sekertaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) DIY Dra. Sri Mulyani, M.Si menerima langsung kunjungan kerja Pemkot Ambon.

Kunker Pemkot Ambon ini dipimpin oleh Asisten III Sekertaris Pemkot Ambon R. Soplanit, S.H. Beliau juga menyampaikan tujuan kunker ini adalah ingin mengetahui dan belajar terkait penataan SAKIP yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

“ Yogyakarta sangat berarti, karena Yogyakarta sebagai guru bagi Ambon, kami ingin selalu belajar dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta,” ungkap Soplanit.

Dra. Sri Mulyani, M.Si menyampaikan rasa terimakasih atas kedatangan dan kepercayaan Pemkot Ambon untuk memilih Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka kunjungan kerja dan juga menyampaikan proses penataan SAKIP di Pemda DIY.

Dalam sambutannya Sri menjelaskan, SAKIP Daerah Istimewa Yogyakarta dimaksudkan sebagai perwujudan peran serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah untuk mewujudkan adanya akuntabilitas dan pencapaian kinerja dalam pelaksanaan visi dan misi yang telah ditetapkan, sekaligus juga dimanfaatkan sebagai alat untuk memperbaiki kinerja setiap instansi ditahun yang akan datang.

Hal tersebut merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Sri juga menyampaikan bahwa, perlu adanya sumber daya manusia yang handal untuk mewujudkan aplikasi SAKIP yang baik “ Maka dengan kerangka pencitraan *good government* kondisi ideal yang dilaksanakan di DIY, yaitu semua kegiatan organisasi pemerintah telah dilaksanakan secara terarah dan terukur,” ungkap Sri. (\*/\*ph)

HUMAS DIY



## KPK Ingin Optimalkan Pendapatan Asli Daerah DIY

by Humas

25 April 2019

[Berita Daerah Istimewa Yogyakarta](#)



Yogyakarta (25/04/2019) jogjaprovo.go.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) terkait Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Seluruh Pemerintah Daerah Se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Gedung Pracimosono, Komplek Kepatihan, Yogyakarta, Kamis (25/4).

Rakor tersebut dilaksanakan untuk mengurangi kejahatan korupsi yang ada di Indonesia dengan melakukan upaya-upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh pemerintah, dengan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ir. Gatot Saptadi.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Korwil V KPK RI Dzakiyul Fikri mengatakan, untuk mengoptimalkan peran dalam pemberantasan korupsi agar bisa menyeluruh di wilayah Indonesia, KPK membuat beberapa program diantaranya, Pengadaan Perencanaan Berbasis Elektronik/ Planning, Kemudahan Perijinan Berbasis Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Peningkatan Kapabilitas APIP, Optimalisasi Pendapatan Daerah, Manajemen SDM, Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pengelolaan Dana Desa.

“Untuk pelaksanaan atau progres di wilayah DIY rata-rata cukup baik, namun dalam sektor optimalisasi pendapatan daerah khususnya pengendalian APIP daerah perlu ditingkatkan dan dilakukan monitoring secara online sehingga transparan dan akuntabel,” ungkap Fikri.

Agar selaras dengan upaya pencegahan korupsi, maka perlu dibuat terobosan-terobosan baru, kreasi-kreasi yang diambil dan mencari solusi bersama guna peningkatan optimalisasi pendapatan daerah di Kabupaten/Kota se Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menanggapi hal itu, Sekda DIY Ir. Gatot Saptadi menyambut baik dilaksanakannya rapat koordinasi di DIY, program-program yang dilaksanakan KPK tentunya berdampak baik untuk wilayah Kabupaten/Kota DIY untuk mengurangi tindak pidana korupsi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat DIY.

“Pertemuan kali ini saya anggap cukup penting, karena dapat menambah pencerahan untuk kita terkait upaya mengoptimalkan pendapatan daerah dan mengantisipasi resiko-resiko yang muncul dan dilaksanakan secara berkesinambungan melalui koordinasi dan komunikasi,” ungkap Gatot.

Dalam kegiatan ini turut hadir perwakilan dari Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta, PLN (Persero) DIY, Direktorat Jendral Pajak DIY, Badan Pertanahan Nasional DIY dan Bank Pembangunan Daerah DIY. (\*/ph).

HUMAS DIY



## Menjelang Ramadhan Stok Bahan Pangan Pokok di DIY

### Aman

by Humas

23 April 2019

#### Berita, Daerah Istimewa Yogyakarta, Informasi

Yogyakarta (23/04/2019) jogjaprovo.go.id – Saat ini bahan pangan di DIY semakin aman. Penggunaan bahan berbahaya semakin menurun. Hal ini disampaikan oleh Asisten Perkonomian dan Pembangunan Sekda DIY, Drs. Tri Saktiyana, M.Si saat melakukan *press conference* pada (23/04) di ruang media center Bale Woro, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.

Pada kesempatan ini Drs. Tri Saktiyana, M.Si menyampaikan, hasil Pantauan Harga Dan Ketersediaan Stok Bahan Pangan Pokok Di Kabupaten/Kota, terkait dengan persiapan DIY menjelang bulan ramadhan 2019 bersama dengan perwakilan BPOM DIY, BI, PERTAMINA, BULOG, SATGAS Pangan Polda DIY dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

Pada tanggal 15, 16, 18 dan 22 April 2019 TPID DIY beserta TPID Kabupaten/Kota melakukan pemantauan ke pasar-pasar tradisional di lima Kabupaten DIY. Hal ini dilakukan untuk melihat kondisi ketersediaan stok dan pergerakan harga kebutuhan bahan pangan pokok di DIY.

Tri Saktiyana menyampaikan adapun pasar yang dikunjungi adalah Pasar Argosari Kabupaten Gunung Kidul, Pasar Wates Kabupaten Kulonprogo, Pasar Prambanan Kabupaten Sleman, Pasar Beringharjo Kota Yogyakarta, dan Pasar Niten Kabupaten Bantul.

“ Dari hasil pemantauan pasar-pasar di lima kabupaten yang ada di DIY, harga-harga cukup terkendali, kecuali bawang putih yang harganya naik tapi masih dalam batas ambang kewajaran,” ungkap Tri.

Dalam kesempatan itu Tri juga menjelaskan beberapa komoditas yang mengalami kenaikan selama pemantauan antara lain, Cabai Rawit Merah (44,16%); Bawang Putih Sincau (8,95%); Bawang Putih Kating (5,76%); Bawang Merah Kecil (4,82%); dan Cabai Merah Keriting (4,29%). Melonjaknya harga dikarenakan permintaan konsumen yang mengalami peningkatan, sedangkan pasokan masih minim.

Tri menegaskan bahwa, program pengendalian inflansi yang dilakukan TPID DIY tetap mengacu pada prinsip 4K yaitu, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, Komunikasi Efektif dan Keterjangkauan Harga. Juga dari SATGAS Pangan mengedepankan preventif, pre-emptif dan represif yang akan dilakukan untuk menghimbau pelaku usaha agar tidak merugikan masyarakat.

Tri menyampaikan bahwa, dari hasil pemantauan pasar-pasar di lima Kabupaten/Kota DIY harga dan ketersediaan bahan pangan pokok relatif stabil serta siap menghadapi bulan ramadhan 2019. Upaya yang dilakukan yakni bekerja sama dengan luar daerah untuk mengirimkan bahan pangan pokok.

Sementara itu Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Rustyawati menyampaikan, jika memang masih ditemukan bahan berbahaya pada makanan, namun temuan ini lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun bahan berbahaya yang ditemukan pada makanan yaitu teri medan, cumi kering, ikan asin berbahan dasar cumi, dan kerupuk. Juga BPOM bekerjasama dengan pengelola pasar untuk terus mengedukasi pelaku usaha agar tidak menggunakan bahan berbahaya lagi.

“ Masyarakat harus menjadi konsumen yang cerdas dan mandiri, tentu kami menghimbau untuk tidak mengkonsumsi produk yang memang mengandung bahan berbahaya, kan masih ada alternatif yang lain, dan bisa menentukan sendiri kebutuhan mana yang diperlukan atau tidak ,” ungkap Rustyawati. (\*/ph)

HUMAS DIY



## Pemilu 2019 di DIY Berjalan Aman dan Lancar

by Humas

18 April 2019

[Berita, Jogja](#)



Yogyakarta (18/04/2019) jogjaprovo.go.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan Konferensi Video untuk memonitoring hasil pasca Pemilu 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Konferensi Video ini menindaklanjuti kegiatan sebelumnya (09/04). Kegiatan ini dipimpin oleh Dirjen Politik Pemerintah Umum Kemendagri, Soedarmo dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Ir. Gatot Saptadi.

Sekda DIY menyatakan pelaksanaan Pemilu serentak pada 17 April 2019 di 11.780 TPS di DIY berjalan lancar, damai dan tidak ada permasalahan yang signifikan saat pelaksanaan Pemilu dimulai.

“Presentase kepemilihan saat ini masih dalam dinamika pencatatan, catatan di kami bahwa partisipasi warga DIY diatas 70% dan kegiatan terkait di lapangan sedang dalam proses menuju ke kecamatan,” ungkap Gatot.

Adapun yang ikut hadir dalam Konferensi Video yaitu, perwakilan dari Forum Koordinasi di Daerah (Forkopinda), Wakapolda DIY, Danlanal Yogyakarta, Kejaksaan Tinggi DIY, Kabinda DIY, Kesbangpol, Diskominfo DIY, Ketua KPU DIY, dan Ketua Bawaslu DIY dilaksanakan pada Kamis (18/04) di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.

Dalam Konferensi Video yang dilaksanakan, Wakapolda menambahkan bahwa, kondisi keamanan di DIY yang terpantau dari sebelum dan sesudah pemungutan suara dimulai, terpantau aman dan kegiatan masyarakat juga berjalan seperti biasa. “ Untuk menjaga kondusifitas wilayah Yogyakarta, kami bersama-sama TNI melakukan kegiatan patroli dalam skala besar untuk memantau berjalannya pemungutan suara agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Hamdan Kurniawan selaku ketua KPU DIY menyampaikan terkait hasil Pemilu serentak 2019 yang telah dilaksanakan di DIY bahwa Pemilu kali ini berjalan baik dan lancar, meskipun terkendala kurangnya surat suara di beberapa titik.

“Di DIY ini ada penambahan jumlah pemilih yang pindah memilih, yang jumlahnya mencapai 50.000 tetapi sudah kami antisipasi dengan memindahkan surat suara dari TPS lain ke kecamatan lain, dan Alhamdulillah sudah terpenuhi,” ungkap Hamdan.

Hamdan menjelaskan, untuk mengantisipasi target di Yogyakarta yang targetnya 82% dan harapannya target tersebut dapat terpenuhi. Hampir di setiap TPS surat suara hanya tersisa sedikit meskipun belum mengetahui pasti, dikarenakan rekap di jenjang tersebut baru akan dilakukan oleh BPK pada 19 April sampai selesai. Angka real partisipasi belum dapat diketahui pada saat ini.(\*/ph)

HUMAS DIY



#### D. Analisis Penulis

Sesuai dengan uraian pada bab II mengenai peran humas, maka peran humas Pemda DIY dalam penulisan press release adalah sebagai Fasilitator Komunikasi dan Teknisi Komunikasi. Peran humas Pemda DIY sebagai Fasilitator Komunikasi yakni, Humas Pemda DIY berelasi dengan media yang ada di Yogyakarta, seperti halnya dengan JogjaTV, AdiTV, KedaulatanRakya, TVRI, dan Jogja Istimewa TV. Humas Pemda DIY memberi ruang untuk media seperti halnya memfasilitasi media dengan sebuah ruangan yang ada di lingkungan Pemda DIY, yaitu media center, memberikan informasi terkait dengan agenda kegiatan yang ada di Pemda DIY setiap harinya melalui pesan whatsapp group humas dan media, dalam hal ini Kasubag yang menangani.

Peran humas Pemda DIY lainnya terkait dengan *Fasilitator Komunikasi* yaitu, untuk menjembatani Pemda DIY kepada masyarakat untuk menyebarluaskan informasi terkait dengan aktivitas-aktivitas yang ada di Pemda DIY, dan sebagai sarana masyarakat dalam menuangkan aspirasinya. Hal ini dilakukan Pemda DIY sebagai bentuk atau upaya pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memenuhi pelayanan publik secara cepat, benar, akurat, dan transparan. Humas Pemda DIY selalu berusaha untuk *update* berita dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pemda DIY disetiap harinya dengan mengunggah semua *press release*/berita melalui media elektronik seperti website ([www.jogjaprovo.go.id](http://www.jogjaprovo.go.id)). Dipilihnya media elektronik internet seperti *website* sebagai salah satu media untuk mempublikasikan setiap kegiatan atau aktivitas di Pemda DIY, karena media elektronik internet memiliki beberapa kelebihan yaitu dari segi waktu, karena media elektronik tergolong cepat dalam menyebarluaskan berita kepada masyarakat, memiliki audio visual yang memudahkan publik untuk mencari dan memahami suatu informasi. Masyarakat juga bisa langsung mencari informasi disaat hari yang sama.

Peran humas Pemda DIY terkait dengan Teknisi Komunikasi yaitu, melakukan kegiatan penulisan *press release* untuk website [jogjaprovo.go.id](http://jogjaprovo.go.id).

Penulisan *press release* diawali dari didapatkannya informasi kegiatan Pemda DIY melalui agenda kegiatan yang ada di bagian protokol, dan kemudian ditulis di papan agenda kegiatan di ruang humas Pemda DIY. Humas Pemda DIY secara langsung mengecek setiap agenda di protokol disetiap pagi dan sore hari, apakah ada tambahan ataupun perubahan agenda kemudian melakukan liputan kegiatan untuk pengumpulan data. Hasil dari liputan akan dijadikan sebagai materi dalam penulisan *press release*, dan kemudian akan di draft dan di publikasikan oleh editor yaitu Kepala Subbagian Humas PDM Pemda DIY.

*Press release* yang dibuat harus mengandung unsur berita yaitu 5W+1H, Piramida terbalik, menggunakan ejaan, tanda baca dan kata sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan tidak lupa yang selalu ada di dalam berita di website Pemda DIY adalah kalimat atau kutipan bermakna dari Gubernur DIY, Wakil Gubernur DIY, Sekda DIY, dan pejabat lain Pemda DIY. Karena berita yang akan dimuat di website bersifat informatif atau berita formal. Hasil *press release* yang dimuat di *website* nantinya juga dijadikan sebagai arsip Pemda DIY.

Penulisan *press release* yang dilakukan setiap adanya kegiatan bertujuan untuk mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Gubernur DIY, Wakil Gubernur DIY, Sekda DIY, dan pejabat lainnya. Begitu pun mendokumentasikan siapa saja yang datang ke Pemda DIY. Oleh karena itu, penting untuk humas melakukan liputan kegiatan yang ada di Pemda DIY.

Di era digitalisasi seperti saat ini humas Pemda DIY dituntut mampu memiliki kemampuan jurnalistik yang baik. Karena dalam proses kerja humas Pemda DIY diutamakan memiliki kemampuan jurnalistik seperti membuat *press release*, mampu menggunakan alat seperti kamera, *handycam*, dan *recorder*. *Press release* yang dibuat nantinya akan diunggah di media elektronik internet seperti di *website* jogjaprovo.go.id untuk dipublikasikan kepada masyarakat dan juga sebagai arsip Pemda DIY.

Namun dalam prosesnya humas Pemda DIY juga mendapat kesulitan, dimana masih minimnya peralatan yang digunakan pada saat liputan seperti kamera, *handycam* dan *recorder*, karena harus bergantian dengan staf yang lainnya. Humas tidak melakukan *briefing* pada saat akan melakukan liputan kegiatan. Dalam hal ini penulis merasa kesulitan untuk awal mula beradaptasi dengan cara kerja di humas Pemda DIY, dimana penulis tidak dijelaskan secara detail kegiatan apa saja yang nantinya akan diliput, begitu pun dengan cara penulisan berita yang sesuai dan akan dimuat di website Pemda DIY. *Proofread* juga dilakukan setelah berita di lihat dan dimuat oleh editor, kesalahan penulisan baru dapat diketahui setelah berita diedit dan dimuat di website oleh editor, dalam tahapan evaluasi ini humas tidak terlibat. Namun hal-hal tersebut dapat terminimalisir dengan arahan kembali oleh editor kepada penulis agar tidak terjadi lagi kesalahan penulisan *press release*. Kelemahan lainnya adalah tidak adanya respon masyarakat pada kolom komentar di website, karena masyarakat lebih memilih media sosial humas Pemda DIY untuk mengeluarkan pendapatnya. Oleh karena itu humas Pemda DIY memanfaatkan juga media sosial sebagai perantara agar masyarakat dapat melihat berita yang ada di *website*, dengan mengunggah foto dan link berita website di media sosial.

Hasil yang dicapai dalam mempublikasikan informasi mengenai Pemda DIY melalui *press release* di media elektronik internet seperti *website* adalah tersampainya informasi kepada publik terutama kepada masyarakat Yogyakarta terkait kegiatan, aktivitas, serta event yang ada di Pemda DIY. Selain itu, tujuan lainnya adalah membangun kepercayaan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Pemda DIY, membangun citra Pemda DIY itu sendiri, dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memajukan DIY. Selain itu publikasi melalui *press release* dilakukan karena salah satu bentuk transparansi Pemda DIY.

Beberapa karakteristik *press release* yang diproduksi Humas Pemda DIY serupa dengan karakteristik yang diungkapkan oleh Kriyantono (2012:140), yakni:

**a. Menyampaikan kegiatan organisasi**

Press release yang diproduksi oleh Humas Pemda DIY meliputi tentang kegiatan-kegiatan Pemda DIY dan event yang ada di DIY, terutama ketika dihadiri oleh pejabat Pemda DIY (Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, dan pejabat pemda lainnya).

**b. Sebagai bahan atau sumber berita bagi media**

Dikarenakan tidak semua kegiatan diliput oleh media, press release yang dibuat oleh Humas Pemda DIY juga menjadi sumber berita bagi beberapa instansi atau media, seperti para wartawan unit kepatihan dan media lainnya. Press Release yang diupload di website [jogjaprov.go.id](http://jogjaprov.go.id) menjadi salah satu jembatan bagi media untuk memperoleh informasi tersebut, sehingga press release yang dibuat haruslah akurat dan tepat.

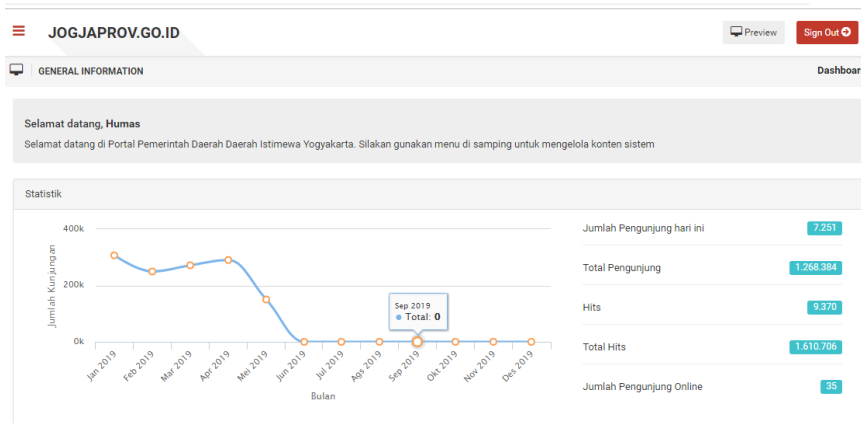
**c. Alat untuk membina dan menumbuhkan sikap**

Dari Kegiatan menulis press release ini diharapkan sebagai cara untuk membina dan menumbuhkan sikap kepada publik. Dengan adanya transparansi informasi mengenai kegiatan atau program kerja Pemda DIY diharapkan akan menimbulkan rasa percaya oleh masyarakat kepada Pemda DIY. Setiap ada kegiatan-kegiatan terkait dengan Pemda DIY pun akan diinformasikan kepada publik melalui media-media yang ada, seperti website, instagram, dan twitter.

**d. Dibuat oleh perusahaan atau organisasi.**

Setiap press release yang di upload ke website [jogjaprov.go.id](http://jogjaprov.go.id) merupakan produksi langsung oleh staff Humas Pemda DIY, bukan dari media lain. Setelah meliput, staff Humas Pemda DIY langsung mengolah data yang berupa foto dan membuat press release untuk diupload di website. Berita atau press release yang diproduksi mencakup peristiwa yang direncanakan atau dilakukan oleh Pemda DIY, seperti pelantikan, jumpa pers dengan media, kunjungan kerja Gubernur dan Wagub, dan lain-lain.

Editor dapat mengetahui secara langsung tren viewer yang ada di website jogjaprov.go.id, segala upaya dilakukan oleh humas Pemda DIY untuk mendapatkan target tren viewer yang telah ditetapkan, seperti menambahkan informasi melalui media sosial seperti instagram, twitter, dan facebook, informasi yang dimuat pun dikutip dari informasi yang ada di website, semua media sosial humas Pemda juga akan bermuara ke website, ini merupakan strategi humas Pemda DIY agar menambahkan viewer website jogjaprov.go.id. Adapun pengukuran tren viewer website adalah sebagai berikut :

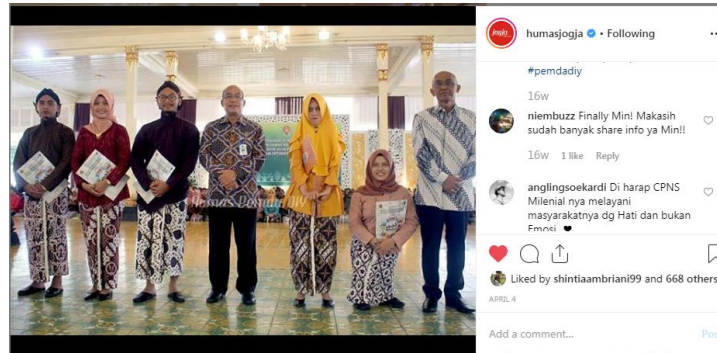


Gambar 4.3 Tren Viewer Website Pemda DIY

Sumber: [www.jogjaprov.go.id](http://www.jogjaprov.go.id)

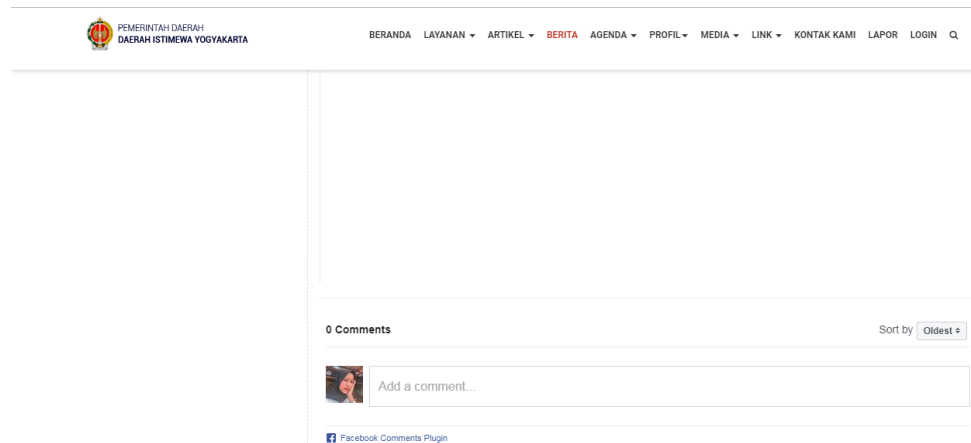
Editor humas Pemda DIY akan mengecek tren viewer di website melalui statistik yang ada. Dibulan-bulan tertentu pengujung akan lebih banyak melihat website Pemda DIY, seperti pada bulan Januari dimana Kota Yogyakarta memang banyak kegiatan yang dilakukan seperti kegiatan pergantian tahun, dan menyajikan tempat-tempat wisata yang ada di Yogyakarta pada momen liburan. Sehingga membuat masyarakat juga ingin mengetahui. Namun pada bulan februari mengalami penurunn tren veiwer, karena memang Pemda DIY tidak banyak kegiatan yang dilakukan, hanya kegiatan kerja Pemerintah Daerah DIY. Sebagai upaya agar tren viewer menjadi banyak, Humas Pemda DIY juga

mempublikasikan kegiatan Pemda DIY melalui media sosial seperti instagram. Adapun berita yang di muat di instagram adalah sebagai berikut:



Gambar 4.4 Penyerahan SK CPNS di instagram humas Pemda DIY

Sumber: Instagram Humas Pemda DIY



Gambar 4.5 Penyerahan SK CPNS di website humas Pemda DIY

Sumber: www.jogjaprov.go.id



Gambar 4.5 Kunjungan Silaturahmi BPK RI dengan Gubernur DIY

Sumber : Instagram Humas Pemda DIY



Gambar 4.6 Kunjungan Silaturahmi BPK RI dengan Gubernur DIY

Sumber: Website Humas Pemda DIY

Dilihat dari gambar di atas bahwa terdapat perbedaan antara publikasi informasi melalui website dengan instagram, yaitu terletak pada kolom komentar yang ada instagram lebih banyak dibandingkan di website malahan bisa dibilang tidak ada komentar di website. Pergeseran minat baca masyarakat saat ini lebih ingin membaca secara ringkas dan jelas isi berita, juga peralihan informasi ke media sosial lebih banyak diminati

masyarkat saat ini. Masyarakat lebih memilih komentr di media sosial instagram terkait berita yang diunggah oleh hums Pemda DIY, karena



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan mengenai laporan Praktik Kerja Lapangan mengenai “Peran Humas Pemda DIY dalam Press Release untuk Website [jogjaprov.go.id](http://jogjaprov.go.id)” penulis dapat memberikan kesimpulan, bahwa humas Pemda DIY memiliki peran sebagai Fasilitator Komunikasi dan Teknisi Komunikasi.

Dalam menjalankan perannya sudah terbilang baik terutama dalam melaksanakan tugas jurnalistik seperti membuat *press release*, sebagai fotografer dan videografer. Untuk mempublikasikan informasi mengenai Pemda DIY humas Pemda DIY menggunakan media elektronik internet seperti website. Setiap kegiatan yang ada di agenda kegiatan akan diliput humas yang melibatkan pejabat Pemda DIY. Publikasi melalui media elektronik dilakukan agar mempermudah layanan publik, dapat diakses oleh publik dimana saja, kapan saja, dan juga bersifat ekonomis. Masyarakat yang beralih di era digitalisasi seperti saat ini lebih memilih internet sebagai sarana untuk mencari berita atau informasi, oleh karena itu humas Pemda DIY juga harus berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin modern.

Penulisan press release yang cepat akan memiliki nilai berita, di dalam website [jogjaprov.go.id](http://jogjaprov.go.id) sudah cukup memenuhi kebutuhan informasi masyarakat mengenai Pemda DIY. Masyarakat Yogyakarta maupun luar dapat dengan cepat mencari informasi di laman website Pemda DIY. Keterbukaan informasi terkait dengan Pemda DIY juga menjadi salah satu alasan humas selalu *update* dalam setiap kegiatan yang ada di Pemda DIY.

Tidak hanya fokus dalam publikasi informasi melalui media elektronik internet, tetapi humas Pemda DIY juga menjalin relasi yang baik dengan wartawan media, terbukti dengan diberikannya ruang untuk

media agar bisa masuk ke lingkungan Pemda DIY, yaitu diberikan fasilitas ruangan atau media center untuk wartawan media.

Proses penulisan press release untuk website jogjaprovo.go.id menjadi tugas pokok humas Pemda DIY. Sebagai bentuk komunikasi dua arah antara Pemda DIY kepada masyarakat. Namun humas Pemda DIY tidak hanya fokus pada media elektronik, tetapi juga masih membuat media cetak, terbukti dengan adanya bulletin Jogjawara yang selalu update pada tiap bulannya. Ini membuktikan peran humas Pemda DIY dalam menyebarkan informasi melalui media konvensional ke kontemporer.

## B. SARAN

Selama penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Biro Umum Humas dan Protokol Sekretariat Daerah DIY, berikut adalah saran yang diharapkan penulis:

1. Dalam menjalankan setiap liputan kegiatan ada sebaiknya di briefing terlebih dahulu, terkait siapa yang hadir dan acara apa yang akan di liput, agar mempermudah petugas saat melakukan liputan kegiatan.
2. Minimnya alat dalam liputan membuat, kesulitan tim humas jika harus bergantian menggunakan alat liputan, akan lebih baik jika menambah alat liputan, seperti recorder, dan kamera.
3. Evaluasi kegiatan sebaiknya dilakukan setelah reporter menyelesaikan press release, evaluasi terkait penulisan press release juga sebaiknya dilakukan sebelum press release dimuat di website agar reporter bisa secara langsung mengganti kesalahan penulisannya.
4. Diharapkan dimasa mendatang, tulisan ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber data untuk penulisan laporan selanjutnya.

